

**KARAKTERISTIK NILAI KEPEMIMPINAN NABI DAUD AS
DALAM AL-QUR'AN**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Muh. Badru Zaman

NIM: 301210058

Pembimbing:

Mohammad Rozi Indrafuddin Lc., M.Fil.I

NIP: 197701222023211004

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**

2026

ABSTRAK

Zaman, Muh Badru. 2026. Karakteristik Nilai Kepemimpinan Nabi Daud As Dalam Al-Qur'an. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Universitas Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Pembimbing: Mohammad Rozi Indrafuddin Lc., M.Fil.I

Kata Kunci: Karakteristik, Nilai Kepemimpinan, Nabi Daud As, Al-Qur'an.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis moral dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam realitas kepemimpinan kontemporer, sehingga diperlukan konsep kepemimpinan yang berintegritas dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi nilai-nilai kepemimpinan Nabi Daud as dalam Tafsir Ibnu Katsir, khususnya pada QS. Sād ayat 26 dan QS. Al-Anbiyā' ayat 78–80, serta mengkaji relevansinya terhadap tantangan kepemimpinan nasional Indonesia dalam aspek keadilan dan integritas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data utama penelitian ini adalah Tafsir Ibnu Katsir, sedangkan data pendukung diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan kajian kepemimpinan dan tafsir Al-Qur'an. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tafsir *maudū'ī* serta teori representasi Stuart Hall melalui mekanisme encoding dan decoding.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir merepresentasikan Nabi Daud as sebagai pemimpin profetik yang memadukan amanah Ilahi, integritas moral, spiritualitas, dan keadilan objektif dalam menjalankan kepemimpinan. Representasi tersebut tampak dalam konsep *khilāfah* sebagai mandat transendental, sikap rendah hati intelektual, serta orientasi kemaslahatan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai kepemimpinan Nabi Daud memiliki relevansi dengan kondisi kepemimpinan nasional Indonesia saat ini, terutama sebagai paradigma etis dalam

menghadapi krisis kepercayaan publik, lemahnya integritas, dan ketidakadilan dalam praktik kekuasaan.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Muh. Badru Zaman

NIM : 301210058

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Karakteristik Nilai Kepemimpinan Nabi Daud Dalam
Al-Qur'an

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosyah.

Ponorogo, 21 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Umar Faruq Thohir, M.H.I., M.S.I

NIP. 198605252020121009

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the supervisor, is written over the text.

Mohammad Roziqul Faddin Lc., M.Fil.I

NIP. 197701222023211004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama : Muh. Badru Zaman
NIM : 3012100058
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Karakteristik Nilai Kepemimpinan Nabi Daud Dalam Al-Qur'an

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Juni 2026

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Juni 2026

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Umar Faruq Thohir M.H.I., M.S.I.
2. Penguji : Dr Zahri Fata Lc, M.Ag
3. Sekretaris : Mohammad Rozi Indrafuddin Lc., M.Fil.I



Ponorogo, 22 juni 2026

Mengesahkan

Dekan

Prof. Dr. Muh Tasrif, M.Ag
NIP.197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Badru Zaman
NIM : 301210058
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD)
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul : Karakteristik Nilai Kepemimpinan Nabi Daud
Dalam Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh segenap penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Ponorogo, yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 21 Mei 2026

Penulis,



Muh. Badru Zaman
NIM. 301210058

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Muh. Badru Zaman
NIM : 301210058
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Karakteristik Nilai Kepemimpinan Nabi Daud Dalam Al-Qur'an

Dengan ini menyatakan dengan bahwa skripsi ini merupakan benar-benar hasil penelitian saya sendiri. Di dalam redaksi skripsi ini murni hasil pemikiran sendiri bukan hasil dari kutipan tiruan atau plagiasi karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Mei 2026

Pembuat Pernyataan



Muh. Badru Zaman
301210058

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kajian Teori	10
G. Metodologi Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II	17
A. Konseptualisasi Nilai Kepemimpinan	17
B. Genealogi dan Signifikasi Tafsir Maudhu'i	23
BAB III.....	28
A. Penafsiran Ayat Kepemimpinan Nabi Daud dalam Al-Qur'an	28
BAB IV	44
A. Konseptualisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Nabi Daud AS (Transformasi Teoretis-Aksiologis).	44
B. Aktualisasi dan Relevansi Kontekstual terhadap Krisis Kepemimpinan Nasional Kontemporer.....	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk (*hudan lin nas*) yang bersifat holistik, universal, dan abadi. Eksistensinya tidak hanya memuat doktrin teologis dan hukum formal, melainkan juga kaya akan narasi sejarah (*qashash al-Qur'an*) yang sarat akan pesan pedagogis dan moral.¹ Sebagai firman Tuhan yang *shalih likulli zaman wa makan* (relevan untuk setiap waktu dan tempat), kisah-kisah yang diabadikan di dalamnya bukanlah sekadar dokumentasi historis masa lalu yang statis.² Sebaliknya, Al-Qur'an menyajikan rekam jejak peradaban masa lampau sebagai cermin dan instrumen refleksi kritis untuk membedah, menganalisis, serta menyelesaikan berbagai problematika kemanusiaan kontemporer.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, salah satu isu krusial yang menduduki posisi sentral adalah dinamika dan problematika kepemimpinan nasional. Sebagai negara demokrasi dengan pluralitas yang sangat tinggi, Indonesia senantiasa dihadapkan pada tantangan besar dalam melahirkan figur pemimpin yang mampu mengintegrasikan integritas moral dan kapabilitas manajerial.³ Realitas sosiologis menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan dari waktu ke waktu sering kali terjebak dalam pragmatisme politik pasca-kebenaran (*post-truth*). Hal ini memicu terjadinya degradasi nilai-nilai etis di ruang publik, di mana kekuasaan cenderung diperebutkan demi kepentingan oligarki kelompok daripada kemaslahatan kolektif rakyat.⁴

¹ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), hlm. 182.

² Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta: LKiS, 2016), hlm. 95.

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 310.

⁴ Sukron Kamil, *Teori Politik Islam: Konflik dan Integrasi Agama dan Negara* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 145.

Krisis kepemimpinan nasional kontemporer semakin diperparah oleh maraknya fenomena dekadensi moral dan etika politik di kalangan elit penguasa. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih mengakar secara struktural mengindikasikan adanya disfungsi spiritual dalam jiwa para pemimpin.⁵ Kekuasaan yang sejatinya merupakan amanah suci demi menegakkan keadilan, kerap kali direduksi menjadi sekadar alat pemuas syahwat politik dan akumulasi materiil.⁶ Ketika seorang pemimpin kehilangan kompas spiritualnya, kebijakan hukum yang dilahirkan pun cenderung bersifat transaksional, tajam ke bawah namun tumpul ke atas, yang pada akhirnya memperlebar jurang ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Dampak langsung dari defisit keteladanan para pemimpin nasional adalah lahirnya polarisasi sosial yang tajam di akar rumput. Masyarakat kehilangan figur *uswah* (teladan) yang mampu merajut kohesi sosial di tengah perbedaan.⁷ Retorika politik yang memecah belah sering kali digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan, tanpa memedulikan stabilitas psikologis bangsa. Kondisi ini melahirkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) yang masif terhadap institusi negara dan sistem hukum.⁸ Masyarakat mengalami disorientasi nilai karena hukum tidak lagi dipandang sebagai panglima keadilan, melainkan sebagai alat legitimasi kepentingan politik para penguasa.

Melihat kompleksitas problematika tersebut, diperlukan sebuah upaya rekonstruksi yang fundamental terhadap paradigma kepemimpinan nasional. Solusi yang ditawarkan tidak boleh hanya menyentuh aspek formal-prosedural seperti reformasi pemilu atau penguatan sanksi hukum

⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 2017), hlm. 89.

⁶ Haedar Nashir, *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya* (Yogyakarta: Multi Presindo, 2013), hlm. 64.

⁷ Komaruddin Hidayat, *Agama Punya Agama: Memosisikan Agama dalam Kehidupan Publik* (Jakarta: Noura Books, 2015), hlm. 112.

⁸ Mohtar Mas'ood, *Negara, Kapital, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 204.

semata, melainkan harus menyentuh akar spiritualitas manusia.⁹ Bangsa ini membutuhkan cetak biru (*blueprint*) kepemimpinan yang mampu menyatukan keunggulan kapasitas intelektual, ketegasan militer-politik, keadilan hukum, dan kedalaman spiritual.¹⁰ Dalam upaya menggali model kepemimpinan ideal yang integral ini, melirik dan membedah kembali khazanah teks suci Al-Qur'an menjadi sebuah keniscayaan akademik yang sangat urgensial.

Di antara sekian banyak figur pemimpin peradaban yang ditampilkan oleh Al-Qur'an, sosok Nabi Daud AS menawarkan prototipe kepemimpinan yang sangat relevan untuk menjawab krisis kontemporer tersebut. Al-Qur'an menampilkan figur beliau dalam lanskap kepemimpinan yang multidimensional dan sangat kokoh.¹¹ Karakteristik kepemimpinan Nabi Daud AS tidak dibangun di atas fondasi tirani atau popularitas semu, melainkan diawali dari heroisme dan keberanian menumbangkan penguasa zalim.¹² Rekam jejak kepemimpinan beliau memberikan preseden historis tentang bagaimana kekuasaan politik tertinggi dan kedaulatan negara dapat bersanding secara harmonis dengan ketundukan mutlak kepada nilai-nilai ketuhanan.

Karakteristik utama Nabi Daud AS yang membedakannya dari penguasa sekuler adalah label *awwab* (sosok yang senantiasa kembali kepada Allah) yang disematkan langsung oleh Al-Qur'an.¹³ Dimensi spiritualitas yang mendalam ini menjadi benteng utama beliau dari jebakan kesombongan kekuasaan. Sifat *awwab* mengondisikan jiwa seorang pemimpin untuk selalu merasa diawasi oleh Tuhan (*muraqabah*), sehingga

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 223.

¹⁰ Din Syamsuddin, *Etika Politik Islam: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Repositori Bangsa, 2012), hlm. 77.

¹¹ Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi: Tahqiq Syaikh Al-Albani*, terj. Dwi Dhani (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm. 512.

¹² Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Juz II (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 88.

¹³ Fakhruddin Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, Jilid 26 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 143

melahirkan komitmen moral yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan.¹⁴ Karakter inilah yang menjadi jawaban atas maraknya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) pada sistem kepemimpinan nasional saat ini, di mana kontrol spiritual sering kali diabaikan dan digantikan oleh formalitas

Selain aspek spiritual, Al-Qur'an juga menonjolkan karakteristik Nabi Daud AS sebagai seorang hakim dan khalifah yang dituntut untuk menegakkan keadilan mutlak tanpa mengikuti hawa nafsu.¹⁵ Kepemimpinan nya diuji langsung melalui berbagai kasus sengketa sosial, di mana beliau diperintahkan untuk memutuskan perkara secara objektif berdasarkan kebenaran ilahiah. Paradigma peradilan Nabi Daud AS menegaskan bahwa hukum harus berdiri tegak di atas asas moralitas, bukan atas dasar intervensi politik atau kekayaan.¹⁶ Karakteristik keadilan hukum ini sangat kontras dengan realitas penegakan hukum di Indonesia saat ini, sehingga menjadikannya bahan komparasi dan pelajaran berharga bagi para pemangku kebijakan.

Relevansi karakteristik Nabi Daud AS semakin kuat ketika Al-Qur'an memotret sisi kemandirian ekonomi dan penguasaan sains-teknologi beliau melalui mukjizat melunakkan besi.¹⁷ Beliau digambarkan sebagai pemimpin yang tidak menggantungkan hidupnya pada fasilitas negara atau upeti rakyat, melainkan bekerja menghasilkan baju besi pertahanan melalui keterampilan metalurgi.¹⁸ Karakteristik ini mencerminkan etos kerja yang mandiri, produktif, dan berbasis pada kedaulatan industri dalam negeri. Di tengah ketergantungan ekonomi nasional saat ini terhadap utang luar negeri dan produk impor, karakteristik kemandirian Nabi Daud AS memberikan

¹⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2015), hlm. 320

¹⁵ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, Jilid 19 (Kairo: Dar Akhbar al-Yaum, 2012), hlm. 11840.

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2014), hlm. 55.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 345.

¹⁸ Abu Al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), hlm. 412.

inspirasi strategis mengenai pentingnya integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi dalam kepemimpinan.

Namun, di balik keagungan karakteristik kepemimpinan yang komprehensif tersebut, kajian mengenai Nabi Daud AS dalam literatur akademik lokal sering kali mengalami penyempitan makna. Figur beliau kerap direduksi hanya sebatas nabi yang bersuara merdu atau kisah masa mudanya yang mengalahkan Jalut. Lebih memprihatinkan lagi, pemahaman sebagian masyarakat dan sebagian naskah tafsir klasik masih terinfiltrasi oleh narasi *israiliyyat* (cerita bersumber dari tradisi Yahudi/Nasrani lama) yang mendiskreditkan kesucian (*'ishmah*) beliau, terutama terkait penafsiran sengketa di ruang mihrab.¹⁹ Distorsi narasi ini mengaburkan esensi karakteristik kepemimpinan dan keteladanan sejati beliau yang dikehendaki oleh teks Al-Qur'an itu sendiri.²⁰

Guna mengembalikan kemurnian pesan Al-Qur'an serta menggali karakteristik kepemimpinan Nabi Daud AS secara utuh, penggunaan metode tafsir tematik (*maudhū'ī*) menjadi instrumen metodologis yang mutlak diperlukan.²¹ Melalui metode ini, seluruh ayat yang mengonstruksikan eksistensi, kepribadian, dan kepemimpinan beliau dapat dikaji, dianalisis, dan disintesis secara komprehensif tanpa harus memaparkan klasifikasi data mentahnya di bagian awal penelitian ini. Dengan demikian, akan lahir sebuah konsep utuh mengenai karakteristik kepemimpinan profetik yang valid, objektif, dan terbebas dari bias narasi-narasi non-Islam yang merusak citra kenabian.²²

Berdasarkan seluruh jalinan argumen di atas, penelitian ini memosisikan diri sebagai upaya kontekstualisasi teologis-politis untuk

¹⁹ Muhammad Husain Al-Dzahabi, *Al-Israiliyyat fi Al-Tafsir wa Al-Hadits* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), hlm. 84.

²⁰ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Lengkap Nabi-Nabi Allah*, terj. Artawijaya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 675.

²¹ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 35.

²² M. Quraish Shihab, *Metode Penyusunan Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 12.

menawarkan solusi atas krisis kepemimpinan nasional melalui kacamata wahyu. Penggalan mendalam terhadap sifat spiritual, keadilan hukum, serta etos kemandirian beliau diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi diskursus kepemimpinan Islam modern. Atas dasar urgensi akademik dan sosiologis tersebut, penelitian ini difokuskan dan diberi judul: "Karakteristik Nabi Daud as Dalam Al-Qur'an".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan dan konteks masalah pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kepemimpinan terhadap kisah Nabi Daud AS dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi nilai kepemimpinan Nabi Daud AS dalam menghadapi tantangan kepemimpinan nasional sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran ayat-ayat kepemimpinan terhadap kisah Nabi Daud AS dalam Al-Qur'an.
- b. Untuk menguraikan dan memetakan relevansi nilai kepemimpinan Nabi Daud AS dalam menghadapi tantangan kepemimpinan nasional sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan tentang Karakteristik Nilai Kepemimpinan Nabi Daud As Dalam Al-Qur'an Menambah dan memperkaya khazanah di dunia keilmuan.²³

²³ Agung Arif Hakim Batubara, Cindy Salsabila Ginting, Murni Amalia, Mutiara Ramadhan Nasution, dan Syahbudin, "Etika Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam: Teladan Nabi Sebagai Fondasi Integritas Pemimpin Modern," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025)

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini membantu pembaca untuk mengetahui tentang Karakteristik Nilai Kepemimpinan Nabi Daud As Dalam Al-Qur'an
- b. Meningkatkan referensi untuk praktisi pendidikan dalam upaya penerapan kebijakan pendidikan di setiap satuan pendidikan.²⁴

E. Telaah Pustaka

- 1) Skripsi yang ditulis oleh M. Nurfaiza Arya Raharja yang berjudul Kepemimpinan Nabi Daud AS Dan Nabi Sulaiman AS Dalam Al-Qur'an. Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.²⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang bersumber utama ayat kisah Nabi Daud As dan Nabi Sulaiman As dalam Qs. al-Naml/27: 36-37 dan Qs. Şad/ 38: 22-24. Data yang didapat kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis dengan menggunakan metode maudu'ī (tematik). Hasil penelitian ini adalah 1. Sebelum mendapatkan ujian dan pelajaran dari Allah Swt, Nabi Daud As. menyelesaikan masalah dengan tergesa-gesa. Namun setelah mendapatkan pelajaran dari Allah Swt. Nabi Daud As menjadi seorang pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik, benar, dan tepat sasaran, 2. Tugas kepemimpinan Nabi Daud As. adalah mengelola wilayah dengan baik, mendengarkan aspirasi pihak yang memilihnya, dan menyelesaikan masalah dengan adil dan benar, 3. Nabi Sulaiman As. merupakan seorang pemimpin yang tegas dan berpendirian kuat, 4. Nabi Sulaiman As. sangat percaya diri akan apa yang ia miliki. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan Nabi Daud As. perbedaan antara kedua penelitian adalah peneliti mengambil kisah dari AL-Qur'an sedangkan penulis mengambil kisah dari kitab tafsir Ibnu Katsir.

²⁴ Risalatul Lailiya dan Nur Fitriatin, "Etika Kepemimpinan dalam Administrasi Pendidikan Islam: Kepemimpinan Berintegritas," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025)

²⁵ M. Nurfaiza Arya Rahardja, *Kepemimpinan Nabi Daud As Dan Nabi Sulaiman As Dalam Al Quran*, Nizham, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Nur Ikhsan Kholil (2022) yang berjudul “Nilai-Nilai Kepemimpinan dalam Kisah Al-Qur’an (Kajian atas Kisah Thalut dalam QS. Al-Baqarah Ayat 246–252)”, penelitian ini berfokus pada penggalian nilai-nilai kepemimpinan Islam yang terdapat dalam kisah Thalut sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur’an.²⁶ Skripsi ini menggunakan metode tafsir maudhu’i (tematik) dengan pendekatan library research, yaitu menelaah sumber-sumber kepustakaan seperti kitab tafsir, buku, dan jurnal yang relevan untuk menemukan prinsip-prinsip kepemimpinan ideal dalam pandangan Al-Qur’an. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi unsur nilai kepemimpinan, seperti intelektualitas, kesehatan fisik dan mental, spiritualitas, serta keikhlasan yang tergambar dalam kisah Thalut, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar bagi pembentukan karakter pemimpin yang adil dan amanah di masa kini. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan Nabi Daud As. perbedaan antara kedua penelitian adalah peneliti mengambil kisah dari AL-Qur’an sedangkan penulis mengambil kisah dari kitab tafsir Ibnu Katsir.
- 3) Jurnal karya Nehru Millat Ahmad yang berjudul “Keadilan Sosial Studi Kisah Nabi Daud Dalam Tafsir Ibnu Kathir” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁷ Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis. Analisis dari al-Qur’an pada tafsir Ibnu Kathir ini menghasiakan bahwa kita jangan merasakan takut untuk menegakkan sebuah keadilan meskipun kepada orang tua sendiri, saudara atau teman dan kisah Nabi Daud bisa menjadikan kita ibrah bahwasanya dalam memutuskan sebuah permasalahan lebih baik dengan jalan musyawarah agar setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama. Persamaan anatar kedua penelitian adalah sama-sama meneliti tentang Nabi

²⁶ Nur Ikhsan Kholil, *Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Kisah Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta*, 2022.

²⁷ Nehru Millat Ahmad, “*Keadilan Sosial Studi Kisah Nabi Daud Dalam Tafsir Ibnu Kathir*”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 9, no. 1, (2022)

Daud As. dalam tafsir Ibnu Katsir. Perbedaan antara kedua penelitian adalah penelitian di atas membahas tentang keadilan sosial, sedangkan penulis meneliti tentang representasi nilai dan kepemimpinan Nabi Daud As.

- 4) Jurnal karya Yose Panca Parulian S yang berjudul “Analisis Kepemimpinan Daud Dalam 1 Samuel 23:1-13 Berdasarkan Teori Kepemimpinan Spiritual Dari Louis William Fry”.²⁸ penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika naratif dan hasil dari analisis tersebut dilihat menggunakan perspektif teori kepemimpinan spiritual dari Louis W. Fry. Hasil dari analisis tersebut adalah (1) Kepemimpinan spiritual yang telah dijelaskan Fry dengan elemen Visi, Iman/Harapan dan Cinta Altruistik dapat terlihat juga dalam kepemimpinan Daud dalam teks 1 Samuel 23:1-13; (2) Kepemimpinan Daud dapat dijadikan teladan baik dalam kepemimpinan secara umum dan juga di dalam kepemimpinan Kristen dalam upaya transformasi dengan bergantung kepada Tuhan dan meletakkan visi pada Iman/Harapan kepada Tuhan, mencari Tuhan sebelum mengambil keputusan untuk bertindak; dan (3) Keberhasilan visi di dalam kepemimpinan Daud bukanlah tercapainya tujuan pribadinya dan tujuan pengikutnya, melainkan tercapainya tujuan Tuhan; dan (4) Penerapan Cinta Altruistik dalam kepemimpinan akan mampu membawa perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan Nabi Daud AS. sedangkan perbedaan antara kedua penelitian adalah penelitian di atas dalam 1 Samuel 23:1-13 Berdasarkan Teori Kepemimpinan Spiritual Dari Louis William Fry, sedangkan penulis mengambil kisah dari Al-Qur’an.
- 5) Ernavina Pelmelay, Astrilily Pelmelay, Model Kepemimpinan Daud dan Implikasinya Bagi Kepemimpinan Masa Kini, Jurnal Kala Nea Volume 2, Nomor 2.²⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan

²⁸ Yose Panca Parulian S, “Analisis Kepemimpinan Daud Dalam 1 Samuel 23:1-13 Berdasarkan Teori Kepemimpinan Spiritual Dari Louis William Fry”, Journal of Christian Education and Leadership, 4 no. 1 (2023)

²⁹ Ernavina Pelmelay, Astrilily Pelmelay, Model Kepemimpinan Daud dan Implikasinya Bagi Kepemimpinan Masa Kini, Jurnal Kala Nea Volume 2, Nomor 2

mengumpulkan data dari berbagai dokumen, buku, jurnal, artikel lainnya sehingga dapat mendapatkan hasil gaya kepemimpinan Daud yang bisa diaplikasikan bagi kepemimpinan masa kini adalah seorang pemimpin yang mengetahui isi hati dan kehendak Tuhan dan mampu mengambil keputusan dan mampu bertanggungjawab atas keputusan yang diambil. Persamaan antara kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang kepemimpinan Nabi Daud AS, sedangkan perbedaan kedua penelitian tersebut adalah penelitian diatas membahas implikasi bagi kepemimpinan masa kini, sedangkan penulis membahas representasi kepemimpinan Nabi Daud AS dalam Al-Qur'an.

- 6) Tubagus, Steven. Makna Kepemimpinan Nabi Daud Dalam Perjanjian Lama, vol 1, no 1.³⁰ Hasil dari studi tersebut adalah Kepemimpinan Daud menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang karena membawa orang untuk percaya kepada Tuhan sehingga tujuan mereka tercapai. Makna kepemimpinan Daud dalam perjanjian lama adalah: pertama, kepemimpinan yang menyenangkan Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan. Kedua, Kepemimpinan Daud yang Tidak Berubah. Ketiga, Sikap terhadap Tuhan: berpegang teguh kepada-Nya dengan sepenuh hati. Keempat, pemimpin yang dapat mempertanggungjawabkan semua keputusan. Persamaan antara kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang kepemimpinan Nabi Daud AS, sedangkan perbedaan kedua penelitian tersebut adalah penelitian diatas membahas kepemimpinan Nabi Daud AS dalam perjanjian lama, sedangkan penulis membahas kepemimpinan Nabi Daud AS dalam Al-qur'an.

F. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi tafsir *Maudhū'ī* (tematik) yang dikembangkan oleh 'Abd al-Hayy al-Faramāwī.³¹

³⁰ Tubagus, Steven. *Makna Kepemimpinan Nabi Daud Dalam Perjanjian Lama*, vol 1, no 1

³¹ 'Abd al-Hayy al-Faramāwī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī: Dirāsah Manhajīyyah Maudhū'īyyah* (Kairo: Maktabah al-Jumhūriyyah, 1977), h. 52.

Metodologi ini dipilih karena pendekatannya yang sistematis dan komprehensif dalam menghimpun serta memahami ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesatuan tema, khususnya mengenai nilai-nilai kepemimpinan Nabi Daud as. dalam Tafsir Ibnu Katsir. Teori tafsir *Maudhū'ī* al-Faramāwī ini melibatkan langkah-langkah struktural, mulai dari menetapkan masalah yang akan dikaji, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan, menyusun runtutan kronologis historis (*asbāb al-nuzūl*), hingga mengorelasikan (*munāsabah*) dan menyusun kerangka penjelasan yang utuh untuk melahirkan konseptualisasi yang mendalam dari teks al-Qur'an.

32

Kegunaan teori tafsir *Maudhū'ī* ini sangat signifikan dalam penelitian ini. Secara metodologis, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk menggali dan mengklasifikasikan secara terstruktur ayat-ayat tentang nilai kepemimpinan Nabi Daud as. sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif, objektif, dan tuntas terkait tema yang diangkat. Dengan memahami hakikat dan tujuan dari nilai-nilai kepemimpinan dalam kisah Nabi Daud as. yang dibedah menggunakan pisau analisis tafsir tematik al-Faramāwī, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam perumusan kebijakan sosial dan kepemimpinan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selain itu, penggunaan metodologi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah diskusi akademis mengenai kontekstualisasi nilai-nilai al-Qur'an dalam realitas kontemporer, serta membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut di bidang studi al-Qur'an dan tafsir.³³

³² Tashdieq Ulil Amri Arhamzah, "Pola Sisipan Isrâ'iliyyât Dalam Tafsir: Analisis Komparatif Tafsir Al-Bagawî Dan Ibnu 'Athiyah" (Disertasi, UIN PTIQ Jakarta, 2025), h. 89.

³³ Achmad Zubairin, "Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks Dan Konteks Al-Qur`An)" (Disertasi, UIN PTIQ Jakarta, 2025), h. 112.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan kitab tafsir, Kamus, buku atau bahan-bahan tertulis yang memiliki keterkaitan dengan tema permasalahan yang akan diteliti sebagai sumber datanya. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti akan mengemukakan data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian detail yang deskriptif analitik, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ada, menafsirkan dan mengadakan analisa yang interpretatif

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan tafsir *maudhu'i* atau tafsir analisis. Melalui pendekatan tafsir *maudhu'i*, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam tentang kepemimpinan dan keadilan di Kisah Nabi Daud dengan tujuan untuk mengetahui makna yang lebih dalam tentang representasi nilai dan kepemimpinan di kisah nabi Daud AS dalam Al-Qur'an. Pendekatan tafsir tahlili dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis teks secara cermat dan sistematis.

3. Data

Untuk menjaga otentisitas dan kedalaman analisis, sumber data dalam penelitian kepustakaan ini dibagi menjadi dua kategori, Sumber Data Primer: Sumber utama dalam penelitian ini adalah teks suci Al-Qur'an al-Karim, khususnya ayat-ayat yang secara tekstual menyebut nama Nabi Daud AS atau mengisahkan otoritas kepemimpinannya. Selain itu, kitab-kitab tafsir otoritatif seperti *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Ibnu Katsir, dan *Tafsir Al-Kabir* karya Fakhruddin Al-Razi digunakan sebagai pisau analisis utama teks. Sumber Data Sekunder: Data pendukung yang melengkapi riset ini bersumber dari literatur kepemimpinan Islam, sejarah nabi (*tarikh al-anbiya'*), buku-buku mengenai krisis etika politik nasional, jurnal ilmiah

bertema *qashash al-Qur'an*, serta artikel akademis lain yang relevan dengan fokus rumusan masalah. Sesuai dengan kaidah tafsir *maudhūʿī*, sebelum data dianalisis pada bab pembahasan, peneliti melakukan pemetaan awal terhadap seluruh ayat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Berdasarkan hasil pelacakan melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*, kata "Daud" (داود) disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur'an yang tersebar di 9 surah berbeda. Untuk mempermudah proses analisis pada tahapan berikutnya, seluruh data ayat tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 klaster konseptual sebagai berikut:

No	Klaster Karakteristik	Rujukan Ayat Al-Qur'an	Output
1	Legitimasi Politis & Militer	QS. Al-Baqarah (2): 251	Analisis heroisme Daud mengalahkan Jalut, awal mula penyerahan kekuasaan politis dan hikmah dari Allah SWT.
2	Otoritas Hukum & Etika Publik	QS. Al-Anbiya' (21): 78 QS. Sad (38): 21-26	Kajian kritis terhadap peran Daud sebagai <i>Khalifah</i> di bumi dan Hakim yang adil; uji integritas moral di ruang Mihrab.
3	Kombinasi Spiritualitas & Sains	QS. Al-Anbiya' (21): 79-80	Penafsiran mengenai sifat <i>awwab</i> , mukjizat tasbeih ekologis (gunung/burung), dan inovasi melunakkan besi sebagai simbol kemandirian teknologi.

		QS. Saba' (34): 10-11 QS. Sad (38): 17-20	
4	Silsilah Kerasulan & Karunia	QS. An-Nisa' (4): 163 QS. Al-An'am (6): 84 QS. Al-Isra' (17): 55 QS. An-Naml (27): 15-16 QS. Saba' (34): 13 QS. Sad (38): 30	Pemaknaan atas pemberian Kitab Zabur, ilmu pengetahuan, serta tuntutan etos kerja penuh syukur bagi keluarga

		QS. Al-Ma'idah (5): 78	
--	--	---------------------------	--

4. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh ayat dihimpun dan diklasifikasikan berdasarkan klaster di atas, data akan dianalisis menggunakan metode Analisis Isi (*Content Analysis*). Langkah analisis dilakukan secara berurutan dengan cara pertama, Tekstualisasi dan Kontekstualisas yakni menganalisis makna semantik kata-kata kunci di dalam ayat (seperti kata *Khalifah*, *Awwab*, *Fashl al-Khithab*) menggunakan bantuan kitab tafsir. Kedua, Kritik Narasi (Desakralisasi Israiliyyat) dengan cara memilah penafsiran klasik untuk membersihkan narasi dari infiltrasi cerita *israiliyyat* yang merusak konsep kesucian nabi (*'ishmah al-anbiya'*). Ketiga, Ekstraksi Nilai Konseptual yaitu menarik substansi nilai kepemimpinan Nabi Daud AS (integritas, keadilan, kemandirian teknologi). Terakhir, Kontekstualisasi Kontemporer dengan cara menghubungkan secara dialektis antara nilai ideal Al-Qur'an (*das sollen*) dengan problematika riil krisis kepemimpinan nasional di Indonesia saat ini (*das sein*), guna melahirkan konklusi yang solutif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami alur dan isi penelitian, peneliti perlu menyusun sistematika pembahasan yang jelas dan rinci. Sistematika ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang menyusun seluruh elemen penelitian, mulai dari pendahuluan hingga penutup, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran peneliti secara logis. Susunannya adalah sebagai berikut :

Pada **bab pertama** ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka

Teori, Metodologi Penelitian yang menjelaskan Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua ini menjelaskan mengenai konsep nilai kepemimpinan dalam Islam serta Tafsir Maudhu'i. Pembahasan pada bab ini mencakup landasan teori yang digunakan sebagai analisis dalam mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan Nabi Daud as.

Bab ketiga ini menjelaskan tentang hasil penafsiran dari nilai kepemimpinan di kisah nabi Daud as. dalam al-quran yang berisi klasifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan.

Bab keempat ini menjelaskan tentang relevansi dari nilai kepemimpinan di kisah nabi daud pada konteks kontemporer.

Bab kelima ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian kritik dan saran.



BAB II

KONSEP NILAI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

A. Konseptualisasi Nilai Kepemimpinan

Secara etimologis, istilah “nilai” dalam tradisi akademik Barat berakar dari bahasa Latin *valere* yang berarti kuat, berharga, atau memiliki kegunaan. Dalam diskursus filsafat dan sosiologi Barat, nilai tidak dipandang sebagai entitas yang turun dari langit, melainkan sebagai produk dari interaksi sosial, rasionalitas manusia, dan kebutuhan akan keteraturan. Menurut konsepsi sosiologis modern Barat yang dipelopori oleh Max Weber, nilai merupakan sebuah orientasi subjektif yang menjadi motor penggerak tindakan rasional individu (*wertrational*). Weber menegaskan bahwa tindakan sosial manusia tidak selalu didorong oleh kalkulasi untung-rugi material, tetapi sering kali diarahkan oleh keyakinan mendalam terhadap nilai-nilai tertentu, baik itu nilai etis, estetis, maupun religius, terlepas dari probabilitas keberhasilannya.³⁴

Nilai bertindak sebagai standar normatif yang memandu pemilihan sarana dan tujuan tindakan sosial dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dalam perkembangannya, kajian tentang nilai menjadi lebih terstruktur melalui kontribusi psikolog sosial Milton Rokeach. Rokeach mendefinisikan nilai secara lebih definitif sebagai suatu keyakinan yang bertahan lama bahwa suatu cara berperilaku atau tujuan akhir eksistensi tertentu secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada cara berperilaku yang sebaliknya.³⁵ Rokeach membagi nilai ke dalam dua kategori utama yang saling berkaitan: nilai terminal (*terminal values*) dan nilai instrumental (*instrumental values*). Nilai terminal merujuk pada tujuan akhir eksistensi yang sangat didambakan oleh individu, seperti kebebasan, kebahagiaan, kesetaraan, dan keamanan nasional. Sementara itu, nilai instrumental merujuk pada mode perilaku

³⁴ Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.

³⁵ Rokeach, M. (1973). *The Nature of Human Values*. Free Press.

yang disukai atau cara-cara yang digunakan untuk mencapai nilai terminal tersebut, seperti bersikap jujur, ambisius, logis, dan bertanggung jawab.³⁶

Pembagian ini memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana individu dan masyarakat Barat memprioritaskan tindakan mereka berdasarkan hierarki nilai yang mereka anut. Dalam epistemologi Barat, nilai bersifat antroposentris, sekuler, dan dinamis. Validitas sebuah nilai sangat bergantung pada konsensus sosial, utilitarianisme, dan perkembangan kultur masyarakat yang melingkupinya. Nilai dipandang sebagai konstruksi murni manusia untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dan memfasilitasi koeksistensi yang damai di tengah pluralitas. Oleh karena itu, nilai dalam pandangan Barat tidak bersifat absolut atau universal dalam arti transendental; ia dapat berubah seiring dengan pergeseran paradigma sosial, kemajuan teknologi, dan dinamika politik. Pendekatan ini melahirkan relativisme moral, di mana apa yang dianggap “baik” atau “berharga” oleh satu masyarakat pada satu waktu mungkin tidak berlaku bagi masyarakat lain di waktu yang berbeda.

Sebaliknya, dalam khazanah pemikiran Islam, konsep nilai memiliki landasan ontologis dan epistemologis yang sama sekali berbeda. Konsep nilai setara dengan term *al-qīmah* (jamak: *alqiyam*) atau *al-khair*, yang bermakna esensi kelayakan, keluhuran, dan harga sesuatu. Nilai dalam Islam bersifat teosentris dan transendental, yang berakar pada wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) dan bersumber dari sifat-sifat Allah (*Asma'ul Husna*).³⁷ Nilai bukan sekadar kesepakatan sosial yang dapat dinegosiasikan ulang, melainkan ketetapan ilahiah yang menjadi pedoman mutlak bagi kehidupan manusia. Sayyid Naquib al-

³⁶ Kahle, L. (1983). *Social Values and Social Change: Adaptation to Life in America*. Praeger.

³⁷ Al-Attas, M. N. (1993). *Islam and Secularism*. ISTAC.

Attas, seorang filsuf Muslim kontemporer terkemuka, menegaskan bahwa nilai dalam Islam tidak tunduk pada relativisme budaya atau perubahan zaman. Nilai-nilai moral fundamental bersifat absolut (*thabāt*) karena bersumber dari penciptaan Tuhan yang inheren dalam fitrah manusia.³⁸ Fitrah ini merupakan kecenderungan alami manusia untuk mengenali dan menerima kebenaran ilahiah. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan dan diaktualisasikan melalui bimbingan wahyu. Nilai bukan sekadar instrumen utilitarian untuk mencapai ketertiban duniawi semata, melainkan sebuah manifestasi dari ketundukan total (*istislām*) kepada syariat demi mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat (*falāh*). Aksiologi nilai dalam Islam menempatkan nilai sebagai pancaran petunjuk ilahiah yang objektif dan absolut. Berbeda dengan Barat yang memandang nilai sebagai produk dialektika sosial (antroposentris), Islam menempatkan Tuhan sebagai sumber segala nilai (teosentris). Tindakan manusia dinilai bukan hanya berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat (*dimensi horizontal/ hablum minannas*), tetapi yang lebih utama adalah berdasarkan kesesuaiannya dengan kehendak Allah (*dimensi vertikal/ hablum minallah*). Integrasi antara kedua dimensi ini memastikan bahwa pencarian nilai dalam Islam selalu bermuara pada pengabdian kepada Sang Pencipta.

Aspek Komparasi	Perspektif Barat	Perspektif Islam
Sumber Nilai	Konsensus sosial, rasionalitas,	Wahyu ilahi (Al-Qur'an dan Sunnah),

³⁸ Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. ISTAC.

	pengalaman manusia	<i>Asma'ul Husna</i>
Sifat Nilai	Antroposentris, sekuler, dinamis, relatif	Teosentris, transendental, absolut (<i>thabāt</i>), universal
Tujuan Akhir	Keteraturan sosial (<i>social order</i>), kebahagiaan duniawi, utilitarianisme	Kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat (<i>falāh</i>), ridha Allah
Validitas	Bergantung pada konteks budaya dan waktu	Melekat pada fitrah manusia dan ketetapan syariat

Diskursus mengenai “kepemimpinan” dalam literatur Barat umumnya didefinisikan melalui lensa struktural, perilaku, dan relasional. Kepemimpinan (*leadership*) diartikan sebagai sebuah proses memengaruhi aktivitas kelompok terorganisasi menuju pencapaian tujuan bersama.³⁹ Fokus utama dari teori-teori kepemimpinan Barat adalah pada efektivitas manajerial, pencapaian target organisasi, dan dinamika kekuasaan antara pemimpin dan pengikut.

Gary Yukl, seorang pakar kepemimpinan terkemuka, memetakan kepemimpinan ke dalam spektrum yang luas, mencakup pengaruh interpersonal, kemampuan persuasi, pembentukan visi, serta

³⁹ Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations* (8th ed.). Pearson

pengorganisasian struktur formal kekuasaan.⁴⁰ Yukl menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar posisi otoritas, melainkan sebuah proses interaksi yang kompleks di mana seorang individu memengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya secara efektif.

Para teoretis Barat telah mengembangkan berbagai model untuk menjelaskan fenomena kepemimpinan. Misalnya, *Transformational Leadership Theory* yang dikembangkan oleh Bernard Bass menitikberatkan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut agar melampaui kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Pemimpin transformasional menciptakan visi yang menarik, merangsang inovasi, dan memberikan perhatian individual kepada pengikutnya.⁴¹ Di sisi lain, *Situational Leadership Theory* yang digagas oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard menekankan pentingnya adaptabilitas; seorang pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kematangan atau kesiapan pengikutnya dalam menghadapi tugas tertentu.⁴²

Dalam perspektif Barat, otoritas kepemimpinan lahir dari kontrak sosial formal, legitimasi hukum positif, atau daya tarik karismatik personal. Efektivitas kepemimpinan diukur dari pencapaian performa organisasi, adaptabilitas terhadap variabel lingkungan, dan kapasitas manajerial dalam menggerakkan sumber daya manusia. Moralitas privat seorang pemimpin sering kali dipisahkan dari fungsi-fungsi publik-manajerialnya (sekularisasi), selama tujuan organisasi tercapai secara efisien.

⁴⁰ Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations* (8th ed.). Pearson.

⁴¹ Bass, B. M (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.

⁴² Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. Prentice-Hall

Di sisi lain, cendekiawan Muslim mengonseptualisasikan kepemimpinan melalui istilah-istilah teologis-politis yang sangat sarat makna, seperti *al-imāmah*, *al-khilāfah*, *al-imārah*, atau *al-riyādah*. Kepemimpinan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka tauhid dan syariat. AlMawardi, seorang pemikir politik Islam klasik, dalam karya monumentalnya *Al-Ahkam asSulthaniyyah* merumuskan bahwa kepemimpinan (*al-imāmah*) disyariatkan sebagai instrumen untuk menggantikan fungsi kenabian dalam dua hal utama: menjaga agama (*hirāsah ad-dīn*) dan mengatur urusan duniawi (*siyāsah ad-dunyā*).⁴³

Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar transaksi kekuasaan sekuler atau seni memengaruhi orang lain, melainkan sebuah amanah teologis yang kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Mahkamah Ilahi. Prinsip ini berakar kuat dari hadis profetik populer: “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya*” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁴ Kesadaran eskatologis ini menuntut seorang pemimpin Muslim untuk senantiasa bertindak dengan penuh kehati-hatian, keadilan, dan integritas, menyadari bahwa kekuasaan yang dipegangnya adalah titipan sementara dari Allah SWT.

Integrasi antara nilai dan kepemimpinan dalam Islam melahirkan konsep kepemimpinan profetik (*al-qiyādah al-nabawiyyah*). Menurut Ibn Taimiyah dalam *As-Siyasah asy-Syar’iyyah*, fondasi utama dari seluruh struktur kepemimpinan Islam bersandar pada dua pilar nilai dasar, yaitu kapasitas/kompetensi (*al-quwwah*) dan integritas/moralitas (*al-amānah*).⁴⁵ *Al-quwwah* merepresentasikan penguasaan sains,

⁴³ Al-Mawardi, A. I. (2006). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Terj. Fadli B.). Darul Falah.

⁴⁴ Al-Bukhari, M. I. (2002). *Shahih Al-Bukhari*. Darussalam.

⁴⁵ Ibn Taimiyah, T. A. (1998). *As-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah*. Dar al-Ma’rifah

kecakapan militer, kepiawaian politik, dan ketajaman eksekutif yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Sedangkan *alamānah* merepresentasikan ketakwaan, kejujuran, keadilan substantif, dan penolakan total terhadap segala bentuk tirani serta korupsi. Kedua pilar ini harus berjalan beriringan; kompetensi tanpa integritas akan melahirkan kediktatoran, sementara integritas tanpa kompetensi akan berujung pada inefisiensi dan kelemahan institusional.

Ketika dikomparasikan, Barat cenderung memisahkan secara tegas (sekularisasi) antara moralitas privat-spiritual seorang pemimpin dengan fungsi-fungsi publik-manajerialnya. Sementara Islam memandang bahwa efektivitas manajerial tidak akan pernah membawa keberkahan dan keadilan sejati apabila dilepaskan dari fondasi nilai-nilai transendental Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, seorang pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara kecakapan profesional dengan kesalehan spiritual, menjadikan kepemimpinannya sebagai sarana ibadah dan pelayanan kepada umat.

B. Genealogi dan Signifikasi Tafsir Maudhu'i

Tafsir maudhū'ī atau yang dikenal luas sebagai metode tafsir tematik merupakan salah satu metodologi modern dalam studi Al-Qur'an yang dirancang untuk menjawab tantangan zaman melalui sintesis ayat-ayat Al-Qur'an yang tersebar di berbagai surah. Secara epistemologis, embrio metode ini sejatinya telah ada sejak masa klasik dalam bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*), di mana para mufassir awal sering kali merujuk pada ayat lain untuk menjelaskan makna suatu ayat. Namun, kodifikasi, sistematisasi, dan peletakan kaidah metodologisnya secara mapan dan akademik baru terwujud secara utuh pada abad ke-20.

Perkembangan ini tidak lepas dari kontribusi besar pemikir asal Mesir, Prof. Dr. Abdul Hayy alFarmawi, lewat karya monumentalnya yang berjudul *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*. AlFarmawi merespons kebutuhan mendesak umat Islam kontemporer akan panduan

Al-Qur'an yang komprehensif dan aplikatif dalam menghadapi problematika modern yang semakin kompleks. Metode ini hadir sebagai antitesis sekaligus penyempurna dari metode *tahlīlī* (analitissekuensial) yang menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai urutan mushaf. Meskipun metode *tahlīlī* sangat kaya akan analisis linguistik dan gramatikal, pendekatan ini kerap kali menghasilkan pemahaman yang parsial atau terfragmentasi bagi pembaca kontemporer yang mencari jawaban utuh atas suatu isu spesifik.

Distingsi metodologis antara keduanya sangat jelas: metode *tahlīlī* membedah Al-Qur'an secara linear mengikuti urutan mushaf, sedangkan metode *maudhū'ī* membedah Al-Qur'an secara tematik melintasi batas-batas surah untuk melahirkan satu sintesis hukum atau konseptual yang utuh.

Al-Farmawi mendefinisikan tafsir *maudhū'ī* sebagai suatu metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surah yang sama-sama membicarakan satu masalah atau satu tema tertentu.⁴⁶ Ayat-ayat tersebut kemudian disusun berdasarkan kronologi turunnya (*asbāb al-nuzūl*) sejauh yang memungkinkan, lalu dianalisis secara mendalam menggunakan berbagai perangkat ilmu penunjang (seperti ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ushul fiqh, dan sejarah) untuk kemudian dilahirkan sebuah konseptualisasi pandangan Al-Qur'an yang utuh, komprehensif, dan integral mengenai masalah yang dikaji tersebut.

Karakteristik utama dari metode ini adalah fokusnya pada kesatuan tema (*unity of theme*). Al-Qur'an diyakini memiliki kesatuan struktural dan semantik yang luar biasa, di mana ayat-ayat yang membahas topik yang sama, meskipun diturunkan dalam konteks dan waktu yang berbeda, saling melengkapi dan menjelaskan satu sama lain. Dengan mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat ini secara holistik,

⁴⁶ Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*. Maktabah al-Jumhuriyyah

mufassir dapat menyingkap worldview (pandangan dunia) Al-Qur'an secara lebih akurat dan mendalam.

Dalam operasionalisasinya, Abdul Hayy al-Farmawi merumuskan tujuh langkah baku yang wajib ditempuh oleh seorang peneliti untuk menjaga objektivitas dan akurasi ilmiah dalam penafsiran tematik. Ketujuh langkah tersebut bertindak sebagai koridor metodologis yang ketat dan sistematis :⁴⁷

1. Menetapkan Topik atau Masalah: Langkah pertama adalah menentukan isu, problematika, atau tema sentral yang akan diteliti pandangannya dari perspektif Al-Qur'an secara spesifik. Pemilihan topik ini harus didasarkan pada urgensi dan relevansinya dengan kebutuhan umat. Dalam konteks riset ini, topik yang ditetapkan adalah karakteristik kepemimpinan Nabi Daud AS.
2. Menghimpun Ayat-Ayat Terkait: Peneliti harus melacak, mengumpulkan, dan menginventarisasi seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik yang telah ditetapkan, baik secara eksplisit (tersurat) maupun implisit (tersirat), mencakup ayat-ayat yang turun di periode Makkah (*Makkiyyah*) maupun Madinah (*Madaniyyah*). Penggunaan *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān* sangat dianjurkan dalam tahap ini.
3. Menyusun Sistematika Ayat: Mengurutkan ayat-ayat yang telah dihimpun secara logis dan tematik, serta sedapat mungkin memperhatikan kronologi historis penurunan ayat (*tārtib alnuzūl*). Hal ini penting untuk menangkap evolusi makna teks, proses nasakh-mansukh (jika ada), dan tahapan penetapan hukum (*tadarruj fī al-tasyrī*).
4. Memahami Korelasi Ayat (Munasabah): Mengkaji hubungan sosiolinguistik dan struktural antara ayat-ayat tersebut di dalam konteks surahnya masing-masing (*munāsabāt al-āyāt fī suwarihā*).

⁴⁷ *Ibid*

Penafsiran tidak boleh tercerabut dari struktur teks aslinya (siyaq al-kalam), karena konteks kalimat sebelum dan sesudahnya sangat memengaruhi makna ayat.

5. Menyusun Konsep Pembahasan: Menyusun draf *outline* atau kerangka pembagian subbab analisis secara sistematis, terarah, dan integral. Tujuannya adalah agar seluruh aspek dari topik yang dibahas terwakili dengan porsi yang proporsional dan alur pemikiran mengalir secara logis.
6. Mempelajari Asbabun Nuzul: Menelaah latar belakang historis makro dan mikro turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*). Pemahaman terhadap konteks historis ini krusial untuk menghindari kesalahan interpretasi teologis, membedakan antara makna literal dan metaforis, serta memahami ruang lingkup aplikasi hukum ayat tersebut dalam realitas kekinian.
7. Analisis dan Sintesis Akhir: Langkah pamungkas adalah menganalisis makna kosakata (*mufradāt*), struktur kalimat, serta mengomparasikan pandangan kitab-kitab tafsir otoritatif (baik klasik maupun kontemporer). Hasil analisis ini kemudian dikonstruksikan menjadi satu kesimpulan holistik yang menjawab rumusan masalah secara tuntas.

Kelebihan utama dari metodologi tafsir *maudhū'ī* gagasan Al-Farmawi ini terletak pada kemampuannya yang sangat dinamis untuk mengomunikasikan teks suci Al-Qur'an (*das Sollen*) dengan realitas sosial kontemporer (*das Sein*). Metode ini menuntut peneliti untuk tidak sekadar menjadi perekam pasif penafsiran masa lalu, melainkan bertindak aktif sebagai dialogis yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kontekstual modern kepada teks Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an senantiasa berfungsi sebagai pedoman yang relevan di setiap ruang dan waktu (*shālih likulli zamān wa makān*).

Dalam penelitian skripsi ini, kerangka metodologis Al-Farmawi diaplikasikan secara ketat untuk menguliti karakteristik kepemimpinan

Nabi Daud AS dari ayat-ayat yang tersebar di berbagai surah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai-nilai kepemimpinan profetik secara komprehensif dan merumuskan aktualisasinya dalam konteks kebangsaan masa kini.



BAB III

AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN KISAH NABI DAUD AS

Dalam pengumpulan ayat-ayat mengenai kisah nabi Daud As dalam Al-Qur'an terdapat 16 kali disebut didalam surat yang berbeda. Namun pada fokus penelitian adalah mengenai tema kepemimpinan Nabi Daud. Kepemimpinan dalam kisah Daud terdapat pada surat al-Anbiya' : 78-80 dan Sad : 26. Pada pemaparan ini, peneliti akan memaparkan data dari ayat tersebut, pendeskripsian ayat menggunakan teori tafsir *maudhū'ī*.

A. Penafsiran Ayat Kepemimpinan Nabi Daud dalam Al-Qur'an

1. Surat Al-Anbiya' : 78-80

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ
يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لَتُحْصِنَكُمْ مِنْ
بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

78. Dan (Ingatlah) Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya. Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu.

79. Lalu, Kami memberi pemahaman kepada Sulaiman (tentang keputusan yang lebih tepat). Kepada masing-masing (Daud dan Sulaiman) Kami memberi hikmah dan ilmu. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya.

80. Kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu (dalam peperangan). Maka, apakah kamu bersyukur (kepada Allah). ?⁴⁸

⁴⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=1&to=112>

Surat Al-Anbiya' secara keseluruhan dikategorikan sebagai surat Makkiyah, yang berarti ayat-ayatnya diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Periode Makkiyah dicirikan oleh penekanan kuat pada penguatan akidah, tauhid, hari kebangkitan, serta kisah-kisah para nabi terdahulu sebagai *tasliyah* (penghibur) dan *ibrah* (pelajaran) bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang sedang menghadapi tekanan dan penolakan di Mekah.⁴⁹ Dalam konteks ini, kisah Nabi Daud AS dan Sulaiman AS dalam ayat 78-80 berfungsi untuk menegaskan bahwa Allah SWT senantiasa membimbing para utusan-Nya dengan hikmah dan ilmu, serta memberikan dukungan ilahi dalam menjalankan misi kepemimpinan dan penegakan keadilan, meskipun menghadapi tantangan yang berat. Ini juga menjadi penegasan bahwa kepemimpinan profetik tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga praktis dalam menyelesaikan problematika duniawi.

Mengenai *asbāb al-nuzūl* ayat 78, para mufasir, termasuk Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Ath-Thabari, meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sebuah kasus hukum riil yang diajukan kepada Nabi Daud AS dan putranya, Nabi Sulaiman AS. Diceritakan bahwa sekelompok kambing milik seorang peternak masuk ke kebun milik orang lain pada malam hari dan merusak tanaman di dalamnya. Kerusakan ini, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut *nafasyat*, mengacu pada perusakan yang dilakukan oleh ternak tanpa pengawasan di waktu malam.⁵⁰ Kasus sengketa ini menuntut adanya keputusan hukum yang adil untuk memberikan kompensasi kepada pemilik kebun yang dirugikan dan menegakkan tanggung jawab atas kelalaian pemilik kambing. Peristiwa ini menjadi latar belakang historis yang sangat penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an mendokumentasikan proses ijtihad dan dinamika pengambilan keputusan hukum dalam sebuah sistem

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 432.

⁵⁰ Abu Al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), 340.

pemerintahan profetik, yang menuntut kebijaksanaan dan keadilan dari para pemimpin.

Ditinjau dari aspek *munāsabah* (korelasi), ayat 78-80 memiliki korelasi yang sangat erat dengan ayat-ayat sebelumnya dalam Surat Al-Anbiya' yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS dan Nabi Luth AS. Al-Qur'an menyusun narasi para nabi ini secara berurutan untuk menunjukkan bahwa rahmat, hikmah, dan ilmu Allah SWT diberikan secara berkesinambungan kepada para hamba-Nya yang terpilih, sebagai bentuk dukungan ilahi dalam menghadapi tantangan dakwah dan kepemimpinan.⁵¹ Khusus untuk Nabi Daud AS dan Sulaiman AS, *munāsabah* ayat ini menonjolkan sisi keistimewaan mereka dalam bidang hukum dan ilmu pengetahuan (*al- 'ilm wa al-ḥukm*), serta kemampuan mereka dalam mengelola urusan duniawi dengan bimbingan ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat teologis-spiritual, tetapi juga praktis-yuridis dalam menyelesaikan problematika sosial kemasyarakatan, serta didukung oleh penguasaan teknologi dan kemampuan strategis.

Analisis kosakata (*mufradāt*) pada ayat 78-80 mengungkapkan kedalaman makna dan implikasi yuridis yang terkandung di dalamnya. Kata *yahkumān* (يُحْكِمَانِ) yang berarti "keduanya memutuskan hukum" menggunakan bentuk *fi'il mudhāri'* (kata kerja masa kini/akan datang) yang menunjukkan proses pengambilan keputusan yang dinamis dan berkelanjutan, bukan sekadar keputusan statis.⁵² Ini mengindikasikan bahwa para pemimpin profetik senantiasa berijtihad dan berdialektika dalam mencari solusi hukum terbaik. Kata *al-ḥarṣ* (الْحَرْث) merujuk pada "tanaman" atau "kebun", yang secara spesifik menunjukkan objek sengketa adalah properti pertanian. Sementara itu, kata *naḥṣat* (نَهَضَتْ) secara spesifik merujuk pada tindakan ternak (kambing) yang masuk dan merusak tanaman di kebun pada waktu malam tanpa pengawasan. Implikasi yuridis dari

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 17 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 115.

⁵² Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmid al-Tanzīl*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2001), 128.

nafasyat ini sangat penting, karena kerusakan yang terjadi di malam hari memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan kerusakan di siang hari, di mana pemilik ternak dianggap lebih lalai dalam menjaga ternaknya.⁵³ Ketelitian Al-Qur'an dalam menggunakan istilah ini menunjukkan perhatiannya terhadap detail-detail hukum yang relevan.

Ayat 79 menggunakan frasa *fafahḥamnāhā Sulaimān* (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) yang berarti "Maka Kami telah memberikan pengertian kepadanya (Sulaiman) tentang hukum (yang lebih tepat itu)". Kata *fafahḥamnāhā* berasal dari akar kata *fahima* (memahami), dengan penambahan *syaddah* pada huruf *hā'* yang menunjukkan makna *tafhim* (memberikan pemahaman secara mendalam).⁵⁴ Ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang diberikan kepada Sulaiman bukan sekadar pengetahuan biasa, melainkan pemahaman yang lebih tajam, komprehensif, dan solutif. Frasa *wa kullān ātainā hukman wa 'ilmā* (dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu) menegaskan bahwa baik Daud maupun Sulaiman sama-sama dianugerahi kebijaksanaan (*hukm*) dan ilmu (*'ilm*), namun Sulaiman diberikan kelebihan dalam pemahaman kasus spesifik ini. Ini menunjukkan bahwa hikmah dan ilmu adalah anugerah ilahi yang esensial bagi seorang pemimpin, namun tingkat dan aplikasinya dapat berbeda sesuai dengan kehendak Allah.

Ayat 79 juga menyebutkan *wa sakhkharnā ma'a Dāwūda al-jibāla yusabbiḥna wa al-ṭaira* (dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud). Kata *sakhkharnā* (سَخَّرْنَا) berarti "Kami tundukkan" atau "Kami mudahkan", menunjukkan kekuasaan Allah yang absolut dalam mengendalikan alam semesta.⁵⁵ Tasbih gunung dan burung bersama Nabi Daud AS adalah mukjizat yang menunjukkan kedekatan spiritual beliau dengan Allah, serta kemampuan beliau dalam menyelaraskan diri dengan alam. Ini bukan sekadar fenomena alam biasa,

⁵³ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Jilid 5, 340.

⁵⁴ Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 17, 118.

⁵⁵ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyāf*, Jilid 3, 129.

melainkan manifestasi dari keagungan spiritual Nabi Daud AS yang memungkinkannya berinteraksi dengan makhluk lain dalam dimensi yang lebih tinggi. Implikasi dari mukjizat ini adalah bahwa kepemimpinan profetik tidak hanya mengelola manusia, tetapi juga memiliki dimensi ekologis, di mana pemimpin bertanggung jawab atas keseimbangan dan kelestarian alam.

Ayat 80 secara eksplisit menyebutkan *wa 'allamnāhu ṣan'ata labūsin lakum lituḥṣinakum min ba'sikum* (dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu). Kata *ṣan'ata labūsin* (صَنْعَةَ لَبُوسٍ) merujuk pada "pembuatan baju besi", yang mengindikasikan penguasaan teknologi metalurgi yang canggih pada masanya.⁵⁶ Frasa *lituḥṣinakum min ba'sikum* (guna melindungi kamu dalam peperanganmu) menjelaskan tujuan dari teknologi tersebut, yaitu untuk pertahanan dan keamanan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Daud AS tidak hanya berdimensi spiritual dan hukum, tetapi juga strategis dan teknologis. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu mengembangkan kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan dan perlindungan rakyatnya. Ayat ini diakhiri dengan pertanyaan retorik *fahal antum syākirūn* (maka apakah kamu bersyukur?), yang mengajak manusia untuk merenungkan nikmat Allah berupa teknologi dan kepemimpinan yang bijaksana.

Surah Al-Anbiya' merupakan salah satu surah dalam al-Qur'an yang tidak memiliki nama lain. Penamaan surah ini didasarkan pada penyebutan enam belas nabi di dalamnya, serta disebutkannya nama Maryam suatu kekhasan yang hanya ditemukan pula dalam Surah Al-An'am. Surah ini tergolong makkiyah, menempati urutan ke-21 dalam tartib mushafi dan ke-71 dalam tartib nuzuli, diturunkan setelah Surah As-Sajadah dan sebelum Surah An-Nahl pada periode akhir sebelum hijrah. Terdapat perbedaan

⁵⁶ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Jilid 5, 342.

pendapat mengenai jumlah ayatnya; para qari' Madinah, Makkah, Syam, dan Basrah menyebutkan 111 ayat, sedangkan qari' Kufah menyebutkan 112 ayat. Pendapat yang masyhur menetapkan 111 ayat dengan 1.177 kata dan 5.093 huruf. Surah ini termasuk kategori miun (lebih dari seratus ayat) dan berukuran sedang, tepat setengah juz. Tema utamanya, sebagaimana surah makkiyah pada umumnya, berkisar pada akidah yang mencakup tauhid, risalah kenabian, dan hari kebangkitan.⁵⁷

Pembukaan surah ini diawali dengan pembahasan tentang kenabian, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai keniscayaan datangnya hari kiamat. Setelah itu, surah ini kembali menguraikan tema kenabian melalui kisah beberapa nabi yang diutus Allah SWT. kepada umat manusia. Kelompok ayat tersebut dapat dipahami sebagai penjabaran lebih lanjut dari firman-Nya dalam ayat ke-7, yang menegaskan bahwa utusan sebelum Nabi Muhammad SAW. adalah laki-laki yang diberi wahyu. Dengan demikian, struktur surah ini secara tematis menghubungkan argumen tentang kenabian dengan realitas hari akhir, lalu diperkuat dengan contoh-contoh historis dari para nabi terdahulu.⁵⁸ Hal ini dijustifikasi oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya, bahwa pada surat al-Anbiya' terbagi menjadi empat kategori. Pada ayat diatas termasuk pada kategori ke-tiga yang menjelaskan kisah-kisah para nabi, yang menunjukkan hubungan antara risalah dan aqidah, serta rahmat Allah dan bimbingan-Nya kepada para hamba-Nya yang sholeh dan menggambarkan bagaimana para pendusta dibinasakan oleh-Nya melalui kisah-kisah umat terdahulu.⁵⁹

Ibnu Katsir dalam Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm memberikan penekanan kuat pada aspek naratif dan historis dari kisah ini. Beliau meriwayatkan detail kasus sengketa kebun dan kambing, serta menjelaskan bagaimana Nabi Daud AS memutuskan perkara tersebut dengan memberikan kambing-

⁵⁷ Rizka Thoriq Asbib and Alfiyatul Azizah, *Penerapan Kaidah Thibaq Dan Pengaruhnya Dalam Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Anbiya*, Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 5, no. 2 (2023): 164–79

⁵⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*

⁵⁹ Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Terjemahan. 45

kambing kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Namun, Ibnu Katsir kemudian menguraikan ijtihad Nabi Sulaiman AS yang lebih inovatif, yaitu dengan menyerahkan kambing-kambing kepada pemilik kebun untuk diambil manfaatnya (susu, bulu, anak) selama kebun diperbaiki oleh pemilik kambing, dan setelah kebun pulih, kambing dikembalikan kepada pemiliknya.⁶⁰ Penafsiran Ibnu Katsir menyoroti bahwa meskipun keputusan Nabi Daud AS sah, keputusan Nabi Sulaiman AS dianggap lebih tepat (fafaḥḥamnāhā Sulaimān) karena lebih proporsional dan memberikan keadilan yang lebih komprehensif bagi kedua belah pihak, serta mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan, fleksibilitas ijtihad dan pencarian solusi yang paling maslahat bagi semua pihak adalah sebuah keutamaan yang harus senantiasa diupayakan.

Mengenai ayat 79, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pemberian hukum (kebijaksanaan) dan ‘ilm (ilmu) kepada kedua nabi adalah anugerah ilahi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan perkara dengan benar. Beliau juga menguraikan mukjizat tasbih gunung dan burung bersama Nabi Daud AS sebagai bentuk kemuliaan dan kedekatan spiritual beliau dengan Allah. Ini adalah bukti nyata dari dukungan ilahi terhadap kepemimpinan Nabi Daud AS, yang tidak hanya terbatas pada urusan manusia, tetapi juga mencakup interaksi dengan alam semesta.⁶¹ Adapun ayat 80, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa pengajaran membuat baju besi kepada Nabi Daud AS adalah bentuk karunia Allah yang memungkinkan beliau untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat tidak hanya bergantung pada kekuatan spiritual, tetapi juga pada kemampuan untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi demi keamanan dan perlindungan umat. Ibnu Katsir menekankan bahwa tujuan utama dari teknologi ini adalah untuk pertahanan (lituḥṣinakum min

⁶⁰ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azhīm*, Jilid 5, 341.

⁶¹ Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 17, 120.

ba'sikum), bukan untuk agresi, yang mencerminkan etika perang dalam Islam.

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsīr al-Munīr menggarisbawahi aspek yuridis dan filosofis dari kisah ini. Beliau menjelaskan bahwa meskipun keputusan Nabi Daud AS sah secara hukum, keputusan Nabi Sulaiman AS lebih unggul karena mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) dan prinsip rehabilitasi. Az-Zuhaili berpendapat bahwa ijtihad Sulaiman AS mencerminkan prinsip *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan) dan *al-ḥājah tanzil manzilat al-ḍarūrah* (kebutuhan mendesak menempati posisi darurat), yang merupakan kaidah-kaidah fikih penting dalam pengambilan keputusan hukum.⁶² Ini mengajarkan bahwa dalam memutuskan perkara, seorang pemimpin tidak hanya harus berpegang pada teks hukum secara literal, tetapi juga pada semangat keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Az-Zuhaili juga menekankan pentingnya musyawarah dan pertimbangan matang dalam pengambilan keputusan hukum, bahkan oleh para nabi sekalipun, untuk mencapai solusi yang paling optimal.

Mengenai ayat 79, Az-Zuhaili menafsirkan bahwa pemberian hukum dan 'ilm kepada Daud dan Sulaiman adalah bentuk anugerah Allah yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas kepemimpinan dengan bijaksana. Beliau juga mengaitkan mukjizat tasbih gunung dan burung dengan Nabi Daud AS sebagai simbol dari keselarasan beliau dengan alam dan pengakuan alam semesta terhadap keagungan beliau. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang tidak hanya dihormati oleh manusia, tetapi juga diakui oleh alam semesta karena ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah.⁶³ Adapun ayat 80, Az-Zuhaili menjelaskan bahwa pengajaran membuat baju besi kepada Nabi Daud AS adalah bentuk dukungan ilahi untuk memperkuat pertahanan umat. Beliau menekankan bahwa teknologi ini adalah anugerah yang harus disyukuri, dan

⁶² Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyāf*, Jilid 3, 130.

⁶³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 8, 435.

penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu untuk melindungi diri dari ancaman dan bukan untuk melakukan agresi. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana teknologi harus dimanfaatkan dalam kepemimpinan Islam, yaitu untuk kebaikan dan keamanan umat.

Az-Zamakhshari dalam Tafsīr al-Kasysyāf melakukan analisis balaghah (retorika) dan sastra yang mendalam terhadap ayat-ayat ini. Beliau menyoroti keindahan bahasa Al-Qur'an dalam menggambarkan peristiwa sengketa dan keputusan hukum. Mengenai frasa *wa kunnā liḥukmihim syāhidīn* (dan Kami menyaksikan keputusan yang diambil oleh mereka itu), Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa penggunaan kata ganti "Kami" (Allah) sebagai saksi menunjukkan legitimasi ilahiah terhadap proses peradilan tersebut, sekaligus sebagai peringatan bahwa setiap keputusan pemimpin berada dalam pengawasan Allah.⁶⁴ Ini adalah bentuk akuntabilitas tertinggi bagi seorang pemimpin, yang harus selalu menyadari bahwa setiap tindakannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Az-Zamakhshari juga menganalisis frasa *fafahḥamnāhā Sulaimān* sebagai bentuk pujian Allah terhadap ketajaman intelektual Nabi Sulaiman AS, meskipun beliau lebih muda dari Nabi Daud AS. Ini menunjukkan bahwa hikmah dan kebijaksanaan dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, tanpa memandang usia atau kedudukan. Beliau juga menyoroti bahwa pemimpin harus terbuka terhadap masukan dan ide-ide baru, bahkan dari bawahannya, demi mencapai keadilan yang sempurna.⁶⁵ Adapun mukjizat tasbih gunung dan burung, Az-Zamakhshari menafsirkannya sebagai bentuk kemuliaan Nabi Daud AS yang diberikan kemampuan untuk memahami bahasa alam, yang menunjukkan kedalaman spiritual dan kepekaan beliau terhadap ciptaan Allah. Ini adalah simbol dari kepemimpinan yang harmonis dengan alam semesta.

Mengenai ayat 80, Az-Zamakhshari menyoroti mukjizat melunakkan besi sebagai bentuk kemudahan dari Allah bagi pemimpin yang bertakwa.

⁶⁴ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyāf*, Jilid 3, 128.

⁶⁵ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Jilid 5, 341.

Beliau berargumen bahwa teknologi yang dikuasai Nabi Daud AS bertujuan untuk pertahanan (lituhṣinakum), bukan untuk agresi. Ini memberikan pelajaran bahwa kekuatan militer dalam kepemimpinan Islam harus berorientasi pada perlindungan dan stabilitas sosial, serta tidak boleh digunakan untuk menindas atau melakukan kezaliman. Az-Zamakhshari juga menekankan pentingnya rasa syukur atas nikmat teknologi dan kepemimpinan yang bijaksana, yang merupakan inti dari pertanyaan retorik *fahal antum syākirūn*.⁶⁶

Secara keseluruhan, penafsiran QS. Al-Anbiya' 78-80 dari ketiga kitab tafsir klasik ini mengonstruksikan sosok Nabi Daud AS sebagai pemimpin yang integratif dan multidimensional. Beliau adalah seorang nabi yang taat, hakim yang adil, dan inovator teknologi yang mandiri. Ayat-ayat ini memberikan pesan kuat bahwa kepemimpinan nasional yang ideal harus memiliki ketajaman intelektual dalam berhukum, keterbukaan terhadap pendapat yang lebih baik, serta kemampuan untuk menciptakan kedaulatan melalui penguasaan sains dan teknologi. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi utama dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan bermartabat, serta relevan untuk direfleksikan dalam konteks kepemimpinan kontemporer.

2. Surat Shaad : 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

⁶⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 17, 122.

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”⁶⁷

Surat Sad secara umum diklasifikasikan sebagai surat Makkiyah, yang diturunkan pada periode awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada masa ini, umat Islam sedang menghadapi penolakan dan tekanan dari kaum Quraisy, sehingga surat-surat Makkiyah seringkali berisi penguatan akidah, penegasan tauhid, serta kisah-kisah para nabi sebagai tasliyah (penghibur) dan ibrah (pelajaran) bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya.⁶⁸

Ayat 26 dalam surat ini menduduki posisi sentral sebagai naskah mandat kepemimpinan yang paling eksplisit dalam Al-Qur'an, yang ditujukan langsung kepada Nabi Daud AS sebagai seorang khalifah. Konteks Makkiyah pada ayat ini memberikan penekanan pada prinsip-prinsip universal keadilan, tanggung jawab moral seorang pemimpin di hadapan Tuhan, serta peringatan keras terhadap penyalahgunaan wewenang yang didasarkan pada hawa nafsu, yang merupakan pelajaran fundamental bagi setiap pemimpin di setiap zaman.

Asbāb al-nuzūl ayat 26 berkaitan erat dengan rentetan peristiwa ujian yang dihadapi Nabi Daud AS pada ayat-ayat sebelumnya (ayat 21-25). Peristiwa tersebut adalah masuknya dua orang bersengketa ke ruang mihrab beliau dengan cara memanjat pagar, yang membuat beliau terkejut. Kisah ini, yang seringkali disalahpahami dengan narasi israiliyyat yang mendiskreditkan, sebenarnya adalah ujian dari Allah untuk mengingatkan Nabi Daud AS agar tidak tergesa-gesa dalam memutus perkara sebelum mendengar keterangan kedua belah pihak secara utuh dan cermat.⁶⁹ Setelah Nabi Daud AS menyadari kekhilafannya, segera memohon ampunan kepada Tuhannya, dan bertobat dengan sungguh-sungguh (*kharra rāki'an wa anāba*), Allah kemudian menurunkan ayat 26 ini. Ayat ini berfungsi sebagai

⁶⁷ QS. Sad (38): 26.

⁶⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11, 280.

⁶⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), 100.

penegasan ulang atas statusnya sebagai khalifah sekaligus memberikan garis panduan operasional yang sangat jelas dan tegas dalam menjalankan tugas kepemimpinan, yaitu menegakkan keadilan dan menjauhi hawa nafsu.

Munasabah ayat 26 terhadap ayat-ayat sebelumnya (21-25) menunjukkan proses pembersihan jiwa pemimpin sebelum menerima tanggung jawab besar. Allah SWT tidak memberikan instruksi kepemimpinan ini kecuali setelah Nabi Daud AS menunjukkan kualitas spiritualitasnya melalui tobat, sujud, dan kembali sepenuhnya kepada Allah (awwab).⁷⁰ Hal ini memberikan pelajaran berharga bahwa integritas moral, kedekatan spiritual dengan Tuhan, dan kesediaan untuk mengakui kesalahan serta bertobat adalah prasyarat mutlak sebelum seseorang menjalankan otoritas publik. Kepemimpinan dalam Al-Qur'an bukan sekadar kontrak sosial antara manusia yang bersifat transaksional, melainkan perjanjian suci antara hamba dengan Sang Pencipta untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan di muka bumi, dengan kesadaran penuh akan pertanggungjawaban di akhirat. Analisis kosakata pada ayat 26 QS. Sad mengungkapkan kedalaman makna dan implikasi filosofis-etis yang sangat relevan bagi kepemimpinan. Frasa *yā Dāwūdu innā ja'alnāka khalīfatan fī al-arḍi* (Wahai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di bumi) adalah inti dari mandat kepemimpinan. Kata khalīfah (خَلِيفَةً) secara etimologis berarti "pengganti" atau "wakil", yang dalam konteks ini berarti wakil Allah untuk melaksanakan hukum-hukum-Nya di bumi.⁷¹ Penunjukan langsung oleh Allah sebagai khalīfah menegaskan bahwa kepemimpinan Nabi Daud AS memiliki legitimasi ilahiah yang kuat, bukan sekadar legitimasi dari manusia. Ini juga menyiratkan bahwa kekuasaan adalah amanah suci yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak Sang Pemberi Amanah, yaitu Allah SWT.

⁷⁰ Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 23 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 245.

⁷¹ Az-Zamakhshary, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmid al-Tanzīl*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2001), 120.

Perintah selanjutnya, *fahkum baina al-nāsi bi al-ḥaqqi* (maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil), adalah inti dari fungsi seorang khalīfah. Kata *al-ḥaqq* (الْحَقُّ) berarti "kebenaran" atau "keadilan", yang menunjukkan bahwa standar keadilan pemimpin tidak boleh bersifat relatif atau subjektif, melainkan harus bersandar pada kebenaran objektif yang digariskan oleh wahyu ilahi.⁷² Ini adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum Islam yang menuntut objektivitas dan imparialitas dalam setiap keputusan. Implikasi filosofisnya adalah bahwa keadilan adalah nilai transenden yang harus menjadi pijakan utama setiap kebijakan dan tindakan pemimpin, melampaui kepentingan pribadi atau kelompok.

Larangan *wa lā tattabi' al-hawā* (dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu) adalah peringatan etis yang sangat krusial. Kata *al-hawā* (الْهَوَى) merujuk pada kecenderungan subjektif, keinginan pribadi, atau kepentingan sesaat yang seringkali menjadi musuh utama bagi objektivitas dan keadilan seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan.⁷³ Al-Qur'an secara tegas melarang pemimpin untuk menjadikan hawa nafsu sebagai dasar keputusan, karena hal itu akan membawa pada kesesatan. Frasa *fayudḥillaka 'an sabīlillāh* (karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah) menegaskan konsekuensi fatal dari mengikuti hawa nafsu, yaitu penyimpangan dari jalan kebenaran dan keadilan yang telah ditetapkan Allah. Ini adalah peringatan keras bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang didasari hawa nafsu tidak hanya berdampak buruk pada manusia, tetapi juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah.

Ayat ini diakhiri dengan ancaman keras: *inna al-ladhīna yaḍillūna 'an sabīlillāhi lahum 'adhābun syadīdun bimā nasū yauma al-ḥisāb* (Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan). Frasa *yauma al-ḥisāb* (يَوْمَ الْحِسَابِ) atau "hari perhitungan" merujuk pada Hari Kiamat, di mana setiap amal perbuatan manusia, termasuk tindakan kepemimpinan, akan

⁷² Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Jilid 7, 102.

⁷³ Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 23, 250.

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.⁷⁴ Ini adalah kontrol internal dan eksternal yang sangat kuat bagi setiap pemegang kekuasaan. Implikasi etisnya adalah bahwa seorang pemimpin harus selalu memiliki kesadaran akan akhirat, yang akan mendorongnya untuk berlaku adil, amanah, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan, karena ia tahu bahwa ada pertanggungjawaban yang lebih besar di kemudian hari. Melupakan hari perhitungan berarti kehilangan kompas moral dan spiritual dalam menjalankan kepemimpinan. Ibnu Katsir dalam Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm memberikan penekanan kuat pada aspek 'iṣmah (kesucian) para nabi dan membersihkan narasi seputar kisah Nabi Daud AS dari cerita-cerita israiliyyat yang buruk, terutama yang mengaitkan beliau dengan kisah istri Uria. Beliau menegaskan bahwa kisah sengketa di mihrab adalah ujian dari Allah untuk Nabi Daud AS, di mana beliau sempat tergesa-gesa dalam memutuskan perkara tanpa mendengar keterangan dari pihak kedua secara lengkap.⁷⁵ Namun, setelah menyadari kekhilafannya, Nabi Daud AS segera memohon ampunan dan bertobat dengan sungguh-sungguh (*kharra rāki'an wa anāba*). Penafsiran Ibnu Katsir menekankan bahwa sifat awwab Nabi Daud AS inilah yang membuatnya diampuni dan diangkat kedudukannya di sisi Allah. Ayat 26 kemudian datang sebagai penegasan mandat ilahi setelah Nabi Daud AS lulus dari ujian tersebut, menunjukkan bahwa Allah memilih pemimpin yang memiliki integritas spiritual dan kesediaan untuk bertobat. Ibnu Katsir juga memperingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu adalah penyebab utama jatuhnya seorang pemimpin ke dalam kesesatan, dan menekankan aspek akuntabilitas di hari kiamat (*yaum al-ḥisāb*), di mana setiap kebijakan pemimpin akan dihisab secara detail. Ini adalah kontrol internal yang sangat kuat bagi setiap pemegang kekuasaan, mendorong mereka untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan.

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsīr al-Munīr mengulas etika seorang hakim dan larangan mengikuti hawa nafsu dalam politik dengan sangat

⁷⁴ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyāf*, Jilid 4, 122.

⁷⁵ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Jilid 7, 101.

sistematis. Beliau menjelaskan bahwa Allah menguji Nabi Daud AS untuk menunjukkan bahwa bahkan seorang nabi pun bisa khilaf, dan pentingnya untuk selalu kembali kepada Allah serta introspeksi diri. Perintah “*fahkum baina al-nāsi bi al-ḥaqqi wa lā tattabi’ al-hawā*” adalah prinsip fundamental dalam kepemimpinan Islam yang menuntut keadilan mutlak dan objektivitas.⁷⁶ Az-Zuhaili berpendapat bahwa "hawa nafsu" dalam konteks politik kontemporer dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti korupsi, nepotisme, kebijakan yang diskriminatif, atau keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dengan demikian, ayat ini merupakan dasar bagi penegakan good governance yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan substantif bagi seluruh rakyat. Pemimpin harus berdiri di atas semua golongan dan kepentingan pribadi demi tegaknya keadilan. Az-Zuhaili juga menyoroti bahwa pemimpin harus senantiasa waspada terhadap godaan hawa nafsu yang dapat menyesatkan dari jalan Allah dan menyebabkan azab yang berat di hari perhitungan, yang merupakan peringatan keras bagi setiap penguasa.

Az-Zamakhshari dalam Tafsīr al-Kasysyāf melakukan analisis sastra dan teologis yang mendalam terhadap ayat ini. Beliau menyoroti aspek balaghah dari penunjukan Nabi Daud AS sebagai khalīfah, yang menunjukkan kemuliaan dan tanggung jawab besar yang melekat pada jabatan tersebut. Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa ujian yang diberikan kepada Nabi Daud AS adalah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang berat, dan pemimpin harus selalu ingat akan hari perhitungan.⁷⁷ Beliau juga menganalisis secara tajam frasa *wa lā tattabi’ al-hawā fayuḍillaka ‘an sabīlillāh*, menjelaskan bahwa hawa nafsu dapat membutakan mata hati pemimpin sehingga ia tidak lagi mampu melihat kebenaran meskipun sudah tampak jelas di depannya. Penyimpangan dalam kebijakan publik yang didasari hawa nafsu, menurut Az-Zamakhshari, adalah bentuk kesesatan teologis yang akan membawa pada kehancuran.

⁷⁶ Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid 23, 248.

⁷⁷ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyāf*, Jilid 4, 121.

Penafsiran ini memberikan dimensi spiritual pada setiap tindakan administratif pemimpin, menjadikan setiap kebijakan yang adil sebagai bentuk ibadah dan setiap kebijakan yang zalim sebagai bentuk kemaksiatan. Az-Zamakhshari menekankan bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan menjadikan kebenaran ilahi sebagai satu-satunya pedoman dalam setiap keputusan, demi mencapai keadilan yang hakiki.

Sebagai penutup analisis Bab III, QS. Sad ayat 26 memberikan kerangka etika kepemimpinan yang sangat rigid namun solutif. Nabi Daud AS diposisikan sebagai figur yang telah lulus dari ujian integritas, sehingga layak menyandang gelar khalifah. Pesan utama ayat ini adalah bahwa kekuasaan politik harus tunduk pada supremasi hukum dan moralitas ilahiah. Tanpa keadilan, kekuasaan hanyalah alat pemuas hawa nafsu yang akan membawa pada kehancuran peradaban. Nilai-nilai ini menjadi sangat relevan untuk dibedah lebih lanjut pada bab berikutnya dalam konteks tantangan kepemimpinan nasional saat ini, sebagai upaya untuk merekonstruksi paradigma kepemimpinan yang berintegritas dan berkeadilan.

BAB IV

ANALISIS KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN PROFETIK NABI DAUD AS DAN RELEVANSINYA TERHADAP KRISIS KEPEMIMPINAN NASIONAL

Bab IV ini merupakan jantung dari penelitian yang berupaya melakukan dekonstruksi filosofis dan rekonstruksi teoretis terhadap nilai-nilai kepemimpinan yang melekat pada figur Nabi Daud AS sebagaimana diabadikan dalam teks-teks Al-Qur'an. Analisis dalam bab ini tidak hanya berhenti pada tataran deskriptif-tekstual, melainkan berlanjut pada tataran analitis-aksiologis dan kontekstual yang sangat mendalam. Fokus utama diarahkan pada bagaimana nilai-nilai profetik tersebut ditransformasikan dari teks suci menjadi konsep kepemimpinan yang aplikatif untuk membedah serta memberikan solusi atas krisis kepemimpinan nasional kontemporer di Indonesia. Penulisan ini disusun dengan pendekatan formal-akademik, mengedepankan koherensi logika, dan ketajaman analisis tanpa menyajikan data statistik ayat secara mentah, melainkan fokus pada substansi filosofis dan implikasi aksiologisnya.

A. Konseptualisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Nabi Daud AS (Transformasi Teoretis-Aksiologis).

Bagian ini membedah secara mendalam tiga pilar utama kepemimpinan Nabi Daud AS yang diekstraksi dari tiga fragmen ayat Al-Qur'an yang berbeda namun saling melengkapi secara sistemik. Ketiga pilar tersebut meliputi etika hukum, kecerdasan kolektif, dan kemandirian strategis. Analisis ini menggunakan pisau bedah aksiologi untuk menemukan nilai-nilai absolut yang terkandung dalam setiap tindakan dan instruksi Ilahiah kepada Nabi Daud As.

1. Aksiologi QS. Sad (38): 26 Etika Hukum & Integritas Yudisial

Landasan teologis-politis kepemimpinan Nabi Daud AS ditegaskan secara eksplisit dalam QS. Sad (38): 26. Ayat ini mengandung mandat kekhalifahan yang dibarengi dengan instruksi yudisial yang sangat ketat, yang jika ditarik ke dalam ranah politik modern, merupakan dasar bagi pembentukan *Rule of Law* yang berkeadilan.

Teks "*Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardhi*" (Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di bumi) memberikan legitimasi bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh Nabi Daud AS adalah sebuah mandat ketuhanan (*divine mandate*) yang bersifat amanah. Istilah *khalifah* di sini mengandung makna representasi dan tanggung jawab. Sebagai wakil Tuhan di bumi dalam mengelola urusan manusia, seorang pemimpin tidak memiliki kedaulatan absolut. Kedaulatan sejati tetap berada di tangan Tuhan, sementara pemimpin hanyalah pemegang mandat yang harus tunduk pada hukum-hukum Tuhan (*nomokrasi*).⁷⁸

Dalam perspektif aksiologis, nilai "Khalifah" ini meniadakan konsep tirani. Seorang pemimpin yang menyadari dirinya sebagai khalifah akan selalu merasa terikat oleh etika transenden. Ia bukan pemilik kekuasaan, melainkan pengelola amanah. Kesadaran ini menciptakan batas moral yang sangat kuat, di mana kekuasaan tidak digunakan untuk akumulasi kepentingan pribadi, melainkan untuk menegakkan keteraturan sosial sesuai dengan kehendak Sang Pencipta.⁷⁹ Transformasi teoretis dari konsep ini adalah lahirnya model kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*) namun tetap memiliki otoritas yang kokoh karena berbasis pada kebenaran.

Inti dari instruksi dalam ayat ini terletak pada klausa "*fahkum baina al-nas bi al-haqq*". Secara linguistik, kata *al-haqq* dalam bahasa Al-Qur'an memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup kebenaran faktual, keadilan hukum, dan kesesuaian dengan realitas objektif. Dalam perspektif tafsir Ibnu Katsir, perintah ini mewajibkan seorang pemimpin untuk memutus perkara di tengah masyarakat dengan standar keadilan yang absolut.⁸⁰ Keadilan dalam pandangan profetik tidak bersifat relatif atau bergantung

⁷⁸ Yahya, *Konsep Kepemimpinan dalam Al-Qur'an: Studi Analitis Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PTIQ, 2022), hlm. 45.

⁷⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 182.

⁸⁰ M. Nurfaiza Arya Raharja, *Kepemimpinan Nabi Daud AS Dan Nabi Sulaiman AS Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. 67.

pada konsensus politik semata, melainkan harus berpijak pada nilai-nilai kebenaran yang tetap.

Transformasi teoretis dari klausa ini menghasilkan konsep Integritas Mutlak. Integritas dalam konteks ini dimaknai sebagai keteguhan seorang pemimpin dalam mempertahankan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan tekanan yang hebat. Nabi Daud AS, sebagai representasi pemimpin ideal, diposisikan sebagai figur yang tidak boleh goyah oleh tarikan kepentingan apapun. *Al-Haqq* menjadi kompas moral yang meniadakan ruang bagi relativisme hukum. Dalam kajian aksiologi, nilai ini menegaskan bahwa hukum memiliki martabat yang lebih tinggi daripada pemegang kekuasaan itu sendiri.⁸¹ Ini adalah prinsip dasar dari integritas yudisial, di mana seorang hakim atau pemimpin tidak boleh "menciptakan" kebenaran demi kepentingan tertentu, melainkan harus "menemukan" dan "menegakkan" kebenaran yang sudah ada.

Al-Qur'an memberikan peringatan keras melalui kalimat "*wala tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah*" (dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah). Penggunaan kata *hawa* (nafsu) di sini merujuk pada segala bentuk subjektivitas yang dapat mengintervensi objektivitas putusan publik. Hawa nafsu dalam konteks kepemimpinan politik sering kali bermanifestasi dalam bentuk keinginan untuk mempertahankan kekuasaan, favoritisme terhadap kelompok tertentu, atau dendam pribadi terhadap lawan politik.⁸²

Dalam kacamata metodologi penelitian, poin ini mengekstrak nilai Anti-Subjektivitas (Impartiality). Seorang pemimpin atau hakim profetik dituntut untuk melakukan pemisahan yang tegas antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Imparsialitas bukan sekadar sikap netral, melainkan keberpihakan yang kokoh pada kebenaran. Penolakan terhadap intervensi hawa nafsu ini merupakan syarat mutlak bagi terciptanya

⁸¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 412.

⁸² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 8, hlm. 482.

stabilitas sosial. Tanpa imparsialitas, hukum hanya akan menjadi instrumen penindasan bagi mereka yang lemah dan alat pelindung bagi mereka yang berkuasa.⁸³

Analisis ini juga mengungkap bahwa *hawa nafsu* adalah sumber utama dari segala bentuk korupsi sistemik. Ketika nafsu pribadi telah merasuki ruang publik, maka kebijakan yang dilahirkan akan bersifat bias dan mencederai kemaslahatan umum. Oleh karena itu, Nabi Daud AS diperintahkan untuk melakukan kontrol diri yang sangat ketat. Integritas yudisial dalam kepemimpinan profetik adalah hasil dari perjuangan spiritual melawan egoisme diri demi tegaknya keadilan kolektif. Puncak dari QS. Sad: 26 adalah peringatan tentang "*adzabun syadid bima nasu yaumal hisab*" (azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan). Hal ini memberikan dimensi eskatologis pada tanggung jawab publik. Penolakan terhadap intervensi—baik itu intervensi politik dari elit penguasa lain maupun intervensi pribadi—bukan hanya didasarkan pada kode etik profesional yang bersifat duniawi, melainkan pada ketundukan eskatologis.⁸⁴

Pemimpin profetik menyadari bahwa setiap tanda tangan, setiap kebijakan, dan setiap putusan hukum akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kesadaran akan *yaumul hisab* (hari perhitungan) berfungsi sebagai *internal oversight mechanism* yang jauh lebih efektif daripada lembaga pengawas manapun. Dengan demikian, kepemimpinan profetik menawarkan sebuah model di mana etika hukum memiliki akar yang menghujam pada integritas moral yang transenden. Ini adalah jawaban atas krisis integritas di dunia modern, di mana hukum sering kali dimanipulasi melalui celah-celah prosedural karena hilangnya kesadaran moral sang penegak hukum.

⁸³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 17, hlm. 156.

⁸⁴ Nehru Millat Ahmad, "Keadilan Sosial Studi Kisah Nabi Daud Dalam Tafsir Ibnu Kathir", *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 89.

2. Aksiologi QS. Al-Anbiya' (21): 78-79 Kecerdasan Kolektif & *Problem Solving*

Pilar kedua kepemimpinan Nabi Daud AS berkaitan dengan aspek manajerial, resolusi konflik, dan etika birokrasi yang inklusif. Fragmen ayat ini menyajikan sebuah dialektika kepemimpinan yang sangat maju, di mana kecerdasan kolektif menjadi instrumen utama dalam *problem solving*.

Narasi sengketa antara pemilik kebun dan pemilik kambing dalam QS. Al-Anbiya' (21): 78-79 merupakan laboratorium kepemimpinan yang luar biasa. Kasus ini melibatkan kerusakan aset (tanaman kebun) akibat perilaku aset lain (kambing) yang tidak terawasi. Nabi Daud AS memberikan keputusan awal yang berbasis pada prinsip ganti rugi langsung: kambing diserahkan kepada pemilik kebun. Keputusan ini secara hukum adalah adil karena ada keseimbangan nilai antara kerusakan dan ganti rugi.

Namun, Nabi Sulaiman AS menawarkan solusi yang lebih progresif dan berdimensi jangka panjang. Solusi Sulaiman AS tidak hanya fokus pada hukuman atau ganti rugi, tetapi pada pemulihan aset (*restorative justice*). Pemilik kebun mendapatkan manfaat dari kambing sementara pemilik kambing bekerja memulihkan kebun. Setelah kebun kembali produktif, aset dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Al-Qur'an kemudian menegaskan, "*wa kullan ataina hukman wa 'ilman*" (dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu).⁸⁵

Kasus ini merupakan legitimasi teologis mengenai pentingnya dialog dan keterbukaan terhadap kritik dalam kepemimpinan. Nabi Daud AS, meskipun memiliki otoritas tertinggi sebagai raja dan nabi yang sudah senior, tidak menunjukkan ego kekuasaan atau senioritas yang kaku ketika Sulaiman AS mengajukan pendapat yang berbeda. Sebaliknya, beliau menunjukkan kelapangan dada untuk mengapresiasi dan mengadopsi solusi tersebut karena dianggap lebih membawa kemaslahatan (*mashlahah*).⁸⁶

⁸⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 385

⁸⁶ P Alifiani, *Besi Dalam Risalah Kenabian: Studi Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer*, (Pekalongan: UIN Gus Dur, 2022), hlm. 112.

Dalam kajian aksiologi, nilai yang terkandung di sini adalah Kepemimpinan Komunikatif dan Inklusif. Seorang pemimpin profetik tidak memandang dirinya sebagai sumber kebenaran tunggal yang infallibel (tidak pernah salah) dalam urusan ijtihad publik. Inklusivitas di sini berarti melibatkan berbagai elemen, termasuk bawahan atau generasi muda yang memiliki kompetensi intelektual, dalam proses pengambilan keputusan strategis. Ini menunjukkan bahwa otoritas formal harus bersinergi dengan kecerdasan intelektual untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Dari peristiwa ini, kita dapat mengekstrak nilai Meritokrasi. Nabi Sulaiman AS diberikan ruang bukan karena ia adalah putra mahkota, melainkan karena ia memiliki *fahm* (pemahaman mendalam) yang diberikan Allah.⁸⁷ Kepemimpinan yang sehat adalah kepemimpinan yang memberikan tempat bagi kompetensi, bukan sekadar loyalitas atau kedekatan darah. Kecerdasan kolektif (*collective intelligence*) dalam sebuah negara hanya dapat muncul jika pemimpin menciptakan iklim yang kondusif bagi dialektika pemikiran.

Nilai ini meruntuhkan paradigma kepemimpinan otoriter yang sering kali mengabaikan aspirasi dari bawah karena merasa sudah paling benar. Sikap Nabi Daud As yang bersedia mendengar Sulaiman As mencerminkan etika birokrasi yang sangat maju, di mana kualitas sebuah kebijakan diukur dari efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah, bukan dari siapa yang mencetuskannya. Ini adalah bentuk Problem Solving yang berbasis pada kemaslahatan publik, di mana tujuan akhirnya adalah harmoni sosial dan pemulihan keadaan, bukan sekadar penjatuhan sanksi. Prinsip *win-win solution* yang lahir dari dialog tersebut menegaskan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah menjaga kohesi sosial. Keputusan yang diambil tidak boleh merugikan salah satu pihak secara permanen jika masih

⁸⁷Komisi Yudisial, *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*, (Jakarta: KY RI, 2023), hlm. 24.

ada jalan untuk memulihkan keadaan tanpa harus menghancurkan pihak lain. Kepemimpinan Nabi Daud AS mengajarkan bahwa pemimpin harus menjadi fasilitator bagi terciptanya solusi yang adil bagi semua pihak. Keterbukaan terhadap kritik dan saran merupakan manifestasi dari kerendahan hati intelektual (*intellectual humility*) yang menjadi syarat bagi kemajuan sebuah peradaban. Tanpa keterbukaan ini, kepemimpinan akan terjebak dalam ruang hampa yang jauh dari realitas kebutuhan rakyat.

3. Aksiologi QS. Al-Anbiya' (21): 80 Kemandirian Strategis & Tekno-Inovasi

Pilar ketiga yang sangat krusial namun sering kali luput dari analisis kepemimpinan adalah aspek penguasaan teknologi dan kemandirian strategis. QS. Al-Anbiya' (21): 80 memberikan gambaran unik tentang sisi teknokratis Nabi Daud AS melalui mukjizat pembuatan baju besi (*labusa*). Ayat ini menyebutkan: *"Wa 'allamnahu shan'ata labusin lakum lituhshinakum min basikum"* (Dan Kami ajarkan kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu). Secara aksiologis, mukjizat "melunakkan besi" harus ditransformasikan menjadi konsep Etos Kerja Mandiri. Nabi Daud AS, meskipun seorang raja besar, digambarkan sebagai sosok yang tidak mau memakan harta negara. Beliau bekerja dengan tangannya sendiri untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan strategis.⁸⁸

Nilai yang terkandung di sini adalah integritas ekonomi seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki etos kerja mandiri akan memiliki kemerdekaan jiwa yang tinggi. Ia tidak akan mudah disetir oleh kepentingan donor, cukong, atau kekuatan modal karena ia tidak memiliki ketergantungan finansial pada pihak-pihak yang dapat merusak kebijakan publik. Etos kerja ini juga memberikan teladan bagi rakyatnya bahwa kemuliaan seseorang terletak pada produktivitasnya, bukan pada posisinya sebagai konsumen atau peminta-minta fasilitas negara.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12, hlm. 118.

Baju besi (*labusa*) dalam konteks sejarah militer kuno adalah teknologi disruptif yang mengubah peta kekuatan peperangan. Penguasaan teknologi ini oleh Nabi Daud AS merupakan bentuk Visi Kedaulatan. Transformasi konsep ini dalam konteks negara modern berarti kewajiban pemimpin untuk memastikan penguasaan sektor hulu industri strategis. Sebuah bangsa tidak akan pernah mencapai kedaulatan sejati jika kebutuhan vitalnya baik itu pertahanan, energi, pangan, maupun teknologi informasi bergantung sepenuhnya pada pasokan asing. ⁸⁹

Nabi Daud As memelopori apa yang kita sebut sekarang sebagai industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Beliau tidak hanya memimpin secara spiritual dan politik, tetapi juga memastikan bahwa negaranya memiliki kemandirian dalam memproduksi sarana pelindung bagi rakyatnya. Ini adalah simbol dari Harga Diri Bangsa. Kepemimpinan profetik menuntut adanya integrasi antara visi spiritual dengan kapasitas teknokratis. Tanpa kemandirian industri, sebuah negara akan selalu berada dalam posisi subordinat dan menjadi objek eksploitasi kekuatan global.

Nilai aksiologis dari "melunakkan besi" juga mencakup pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan kemanusiaan. Besi yang keras dapat dilunakkan oleh tangan Daud AS atas izin Allah, memberikan pelajaran bahwa tantangan zaman yang paling keras sekalipun dapat diatasi melalui inovasi dan kerja keras. Pemimpin harus memiliki visi untuk mengolah potensi kekayaan alam negaranya menjadi nilai tambah yang bermanfaat bagi rakyat. Penguasaan teknologi bukan untuk tujuan agresi, melainkan untuk *tuhshinakum* (melindungi kamu), yaitu demi keamanan dan kesejahteraan warga negara. Inilah esensi dari kedaulatan teknologi: kekuatan yang digunakan untuk menjaga martabat manusia dan kedaulatan bangsa dari segala bentuk ancaman.

⁸⁹ Yahya, *Konsep Kepemimpinan*, hlm. 52.

B. Aktualisasi dan Relevansi Kontekstual terhadap Krisis Kepemimpinan Nasional Kontemporer.

Setelah melakukan dekonstruksi aksiologis terhadap nilai-nilai kepemimpinan Nabi Daud AS, bagian ini akan melakukan analisis komparatif-kritis antara idealitas profetik (*Das Sollen*) dengan realitas objektif kepemimpinan nasional di Indonesia saat ini (*Das Sein*). Krisis kepemimpinan nasional kontemporer akan dibedah secara tajam melalui tiga lensa utama: integritas hukum, etika birokrasi, dan kedaulatan ekonomi-industri. Analisis ini bertujuan untuk memberikan tawaran solusi strategis berbasis nilai-nilai Daudiyah untuk menjawab tantangan zaman.

1. Otoritas Hukum Modern vs Integritas Ruang Mihrab

Krisis integritas dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu masalah paling fundamental yang menghambat kemajuan bangsa. Kontekstualisasi QS. Sad: 26 menjadi instrumen kritik yang sangat tajam terhadap praktik penegakan hukum yang telah kehilangan kompas moralnya.

Realitas sosiopolitik menunjukkan bahwa institusi peradilan di Indonesia sering kali terjebak dalam pusaran *Judicial Corruption*. Fenomena mafia peradilan, di mana putusan hukum dapat diperjualbelikan, merupakan antitesis langsung dari perintah "*fahkum bi al-haqq*". Ketika keadilan menjadi komoditas transaksional, maka marwah negara sebagai pelindung rakyat telah runtuh. Nabi Daud AS mengajarkan bahwa ruang pengambilan keputusan hukum adalah "Ruang Mihrab" sebuah ruang sakral yang seharusnya bebas dari segala bentuk polusi kepentingan materiil maupun politik.

Intervensi "hawa nafsu" dalam bentuk suap dari pemilik modal atau tekanan dari elit politik telah menciptakan ketidakpastian hukum yang masif. Hukum yang seharusnya menjadi panglima keadilan justru sering kali menjadi alat legitimasi bagi kepentingan penguasa. Integritas yang dicontohkan Nabi Daud AS menuntut adanya pemisahan yang absolut antara proses yudisial dengan kepentingan pragmatis. Tanpa adanya otonomi moral dari para penegak hukum, sistem hukum modern kita hanya akan menjadi cangkang kosong tanpa substansi keadilan.

Salah satu manifestasi paling nyata dari pengabaian nilai-nilai Daudiyah adalah tren hukum yang "tajam ke bawah, namun tumpul ke atas".⁹⁰ Rakyat kecil yang melakukan pelanggaran minor sering kali dijatuhi sanksi yang sangat berat tanpa pertimbangan kemanusiaan yang mendalam. Sebaliknya, para koruptor atau aktor intelektual kejahatan kerah putih sering kali mendapatkan perlakuan istimewa, mulai dari vonis yang ringan hingga fasilitas mewah di dalam penjara. Ketidakadilan distributif ini memicu ketidakpercayaan publik (*public distrust*) yang sangat dalam terhadap negara.

Nabi Daud AS, melalui prinsip imparsialitasnya, menegaskan bahwa kebenaran (*al-haqq*) tidak mengenal status sosial. Keadilan harus tegak meskipun harus berhadapan dengan kekuatan besar. Krisis kepemimpinan nasional saat ini berakar pada kegagalan para pemimpin untuk menjadi teladan dalam ketundukan pada hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan rekonstruksi integritas yudisial yang berbasis pada kesadaran eskatologis—sebagaimana peringatan akan hari perhitungan dalam QS. Sad: 26. Pemimpin dan penegak hukum harus menyadari bahwa setiap ketidakadilan yang mereka lakukan akan membawa konsekuensi berat, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Etika Birokrasi vs Meritokrasi dan Dialog Terbuka

Krisis kedua dalam kepemimpinan nasional kita adalah budaya birokrasi yang masih sangat feodalistik, tertutup, dan cenderung mengutamakan loyalitas buta daripada kompetensi. Kontekstualisasi QS. Al-Anbiya': 78-79 menawarkan solusi melalui transformasi menuju *Collaborative Governance* yang inklusif.

Kepemimpinan nasional saat ini sering kali terjebak dalam praktik nepotisme yang sistemik, di mana pengisian jabatan strategis lebih didasarkan pada hubungan kekeluargaan atau balas budi politik daripada

⁹⁰ Raharja, *Kepemimpinan Nabi Daud*, hlm. 72.

kapasitas intelektual. Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip meritokrasi yang dicontohkan oleh Nabi Daud As ketika beliau mengapresiasi kecerdasan Sulaiman As. Nepotisme melahirkan inefisiensi birokrasi karena orang-orang yang tidak kompeten diberikan tanggung jawab besar hanya karena faktor kedekatan.

Lebih jauh lagi, dominasi oligarki dalam pengambilan kebijakan publik telah menutup pintu bagi dialog terbuka. Kebijakan-kebijakan strategis sering kali diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Kritik dari masyarakat atau para akademisi sering kali dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas, bukan sebagai instrumen perbaikan.⁹¹ Otoritarianisme halus ini menciptakan jurang antara pemerintah dan rakyat. Nilai Daudiyah tentang keterbukaan terhadap kritik dan apresiasi terhadap solusi alternatif dari pihak lain menjadi antitesis yang sangat relevan bagi kondisi birokrasi kita saat ini.

Aktualisasi nilai-nilai Daud As menuntut adanya reformasi birokrasi yang radikal menuju model Collaborative Governance. Pemimpin nasional harus berani meruntuhkan sekat-sekat feodalisme dan menciptakan budaya dialog yang setara. Sebagaimana Nabi Daud As yang bersedia mendengar Sulaiman As, pemimpin modern harus membuka ruang bagi para ahli, praktisi, dan elemen masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam merumuskan solusi atas masalah bangsa.

Meritokrasi harus dijadikan sebagai satu-satunya standar dalam manajemen birokrasi. Jabatan publik adalah amanah yang harus diberikan kepada mereka yang memiliki "hikmah dan ilmu" (*hukman wa 'ilman*). Dengan mengadopsi etika birokrasi yang inklusif, pemerintah dapat meminimalisir kesalahan kebijakan dan meningkatkan legitimasi publik. Kepemimpinan yang kolaboratif adalah kepemimpinan yang menyadari

⁹¹ MA Adabi & NM Awwaliyah, "Kontekstualisasi Al-Qur'an Dan Pancasila Melalui Penguatan Muslim HUB", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an*, Vol. 14, No. 1, (2020), hlm. 34.

bahwa kompleksitas masalah bangsa saat ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu orang atau satu kelompok saja, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh potensi kecerdasan kolektif bangsa.

3. Kedaulatan Nasional vs Penguasaan Teknologi Industri Hulu

Krisis ketiga yang sangat mendasar adalah rapuhnya kedaulatan nasional akibat ketergantungan yang tinggi pada kekuatan asing dalam sektor ekonomi dan teknologi. Kontekstualisasi QS. Al-Anbiya': 80 memberikan landasan filosofis bagi urgensi kemandirian bangsa.

Indonesia saat ini masih berada dalam bayang-bayang hegemoni asing. Ketergantungan pada impor teknologi industri, keterikatan pada utang luar negeri yang masif, dan lemahnya industri pertahanan dalam negeri adalah bentuk-bentuk kerentanan kedaulatan. Bangsa yang besar ini sering kali hanya menjadi pasar bagi produk-produk asing dan penyedia bahan mentah bagi industri global. Hal ini merupakan bentuk ketidakmandirian yang sangat kontras dengan etos kerja Nabi Daud AS yang memproduksi sendiri teknologi baju besinya.

Lemahnya industri hulu di Indonesia menyebabkan kita kehilangan nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam kita sendiri. Kita mengekspor bijih besi atau nikel dengan harga murah, lalu mengimpor kembali produk olahannya dengan harga berkali-kali lipat. Krisis ketahanan nasional ini hanya dapat diatasi jika pemimpin memiliki visi kedaulatan yang kuat sebagaimana visi Nabi Daud AS dalam menguasai teknologi metalurgi. Kedaulatan bukan sekadar soal menjaga batas wilayah, tetapi soal menjaga kemandirian ekonomi dan teknologi dari intervensi pihak luar.⁹²

Hubungan antara nilai-nilai Daudiyah dengan kedaulatan nasional saat ini bermanifestasi dalam tuntutan untuk melakukan Hilirisasi Industri secara total. Pemimpin nasional harus memiliki keberanian politik untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mewajibkan pengolahan di dalam

⁹² Alifiani, *Besi Dalam Risalah Kenabian*, hlm. 115.

negeri. Penguasaan industri hulu adalah harga mati bagi kedaulatan bangsa. Nabi Daud AS memberikan legitimasi keagamaan bahwa penguasaan sains dan teknologi adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kepemimpinan untuk melindungi rakyatnya (*lituhshinakum*).

Kemandirian ekonomi berarti kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri (*berdikari*) dalam memenuhi kebutuhan strategis. Hal ini menuntut adanya investasi besar-besaran pada riset dan pengembangan teknologi dalam negeri serta perlindungan terhadap industri lokal dari gempuran produk impor yang tidak adil. Pemimpin yang berjiwa Daudiyah adalah pemimpin yang tidak akan membiarkan bangsanya menjadi pengemis di hadapan bangsa lain. Ia akan bekerja keras untuk "melunakkan besi" tantangan ekonomi global demi mewujudkan kemakmuran dan harga diri bangsa Indonesia di mata dunia.

Kesimpulan

Melalui analisis mendalam yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kepemimpinan Nabi Daud AS dalam Al-Qur'an menawarkan sebuah paradigma kepemimpinan yang bersifat holistik dan integratif. Kepemimpinan profetik Daudiyah menyatukan tiga dimensi yang selama ini sering kali terpisah dalam praktik kepemimpinan nasional: dimensi moral-spiritual (integritas), dimensi manajerial-dialogis (inklusivitas), dan dimensi teknokratis-strategis (kemandirian).

Dalam menghadapi krisis kepemimpinan nasional kontemporer, nilai-nilai Daud AS berfungsi sebagai kompas korektif. Penegakan hukum yang imparsial adalah syarat mutlak bagi keadilan sosial. Birokrasi yang meritokratis dan dialogis adalah syarat bagi efektivitas pemerintahan. Dan kemandirian industri hulu adalah syarat bagi kedaulatan bangsa. Nabi Daud AS telah membuktikan bahwa seorang pemimpin dapat menjadi nabi (simbol moral), raja (pemegang otoritas), dan pengrajin (simbol produktivitas) sekaligus.

Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang mampu melampaui kepentingan pragmatis kelompoknya dan kembali pada semangat

pengabdian sebagai khalifah Allah di bumi. Transformasi dari *Das Sein* yang penuh krisis menuju *Das Sollen* yang penuh kemuliaan hanya dapat dicapai jika para pemimpin nasional kita memiliki keberanian untuk mengadopsi etika profetik Nabi Daud AS dalam setiap kebijakan publik yang mereka ambil. Inilah jalan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis multidimensional kepemimpinan nasional kontemporer di Indonesia yang terjebak dalam pragmatisme politik pasca kebenaran (post-truth), maraknya degradasi nilai etis, defisit keteladanan (uswah), serta merebaknya korupsi sistemik. Ketidakpastian hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, feodalisme birokrasi, serta tingginya ketergantungan ekonomi-teknologi pada kekuatan global mempertegas urgensi rekonstruksi paradigma kepemimpinan nasional yang menyentuh akar spiritual manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam riset ini difokuskan pada dua hal utama: pertama, bagaimana penafsiran ayat-ayat kepemimpinan terhadap kisah Nabi Daud AS dalam Al-Qur'an; dan kedua, bagaimana relevansi nilai kepemimpinan Nabi Daud AS dalam menghadapi tantangan kepemimpinan nasional sekarang.

Melalui metode tafsir tematik (maudhūf) dengan pisau analisis dari berbagai kitab tafsir otoritatif—seperti Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm karya Ibnu Katsir, Tafsīr al-Munīr karya Wahbah az-Zuhaili, dan Tafsīr al-Kasysyāf karya Az-Zamakhshari—penelitian ini menghasilkan konseptualisasi yang utuh mengenai karakteristik kepemimpinan profetik Nabi Daud AS sebagai berikut:

Penafsiran Ayat Kepemimpinan Nabi Daud AS: Melalui QS. Al-Anbiya' ayat 78-80, Al-Qur'an mengonstruksikan figur Nabi Daud AS sebagai pemimpin multidimensional yang mengintegrasikan otoritas hukum, spiritualitas terdalam (*awwab*), keselarasan ekologis, dan penguasaan sains-teknologi (metalurgi). Sementara itu, QS. Sad ayat 26 bertindak sebagai mandat kekhalifahan eksplisit yang menetapkan parameter yudisial dan etika publik yang kaku. Ayat ini mewajibkan penegakan keadilan substantif berdasarkan kebenaran objektif ilahiah

(al-haqq) serta melarang keras intervensi subjektivitas personal maupun politik (al-hawā) yang dapat menyesatkan pemimpin dari jalan Allah.

Relevansi terhadap Krisis Kepemimpinan Nasional: Karakteristik profetik Daudiyah memberikan arah solusi atas tiga krisis utama kepemimpinan nasional di Indonesia:

Etika Hukum dan Integritas Yudisial: Konsep "Ruang Mihrab" dan kesadaran eskatologis akan Hari Perhitungan (yaum al-hisāb) pada QS. Sad: 26 relevan menjadi benteng

moralitas guna mengikis fenomena judicial corruption dan mafia peradilan di Indonesia, sehingga menciptakan penegakan hukum yang imparsial tanpa memandang status sosial.

Etika Birokrasi dan Meritokrasi: Dialektika sengketa ladang pada QS. Al-Anbiya': 78-79 membuktikan kelapangan dada Nabi Daud AS dalam menerima kritik serta solusi alternatif dari Nabi Sulaiman AS. Nilai ini sangat relevan untuk mentransformasikan budaya birokrasi Indonesia yang feodalistik dan nepotis menuju iklim collaborative governance yang meritokratis, inklusif, dan menghargai kompetensi intelektual di atas loyalitas buta.

Kemandirian Ekonomi dan Kedaulatan Teknologi: Etos kerja mandiri Nabi Daud AS yang memproduksi baju besi (labūsa) melalui inovasi metalurgi hulu memberikan legitimasi strategis bagi Indonesia untuk melakukan hilirisasi industri secara total. Penguasaan sektor industri strategis hulu merupakan kunci mutlak dalam meruntuhkan hegemoni asing, mengurangi ketergantungan utang luar negeri, dan mengembalikan harga diri serta kedaulatan bangsa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan kritik di atas, beberapa saran akademis diajukan untuk agenda penelitian berikutnya:

1. Integrasi Metode Interdisipliner: Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan metode tafsir tematik (*maudhūṭ*) dengan pendekatan penelitian kualitatif-lapangan (studi kasus atau

fenomenologi) atau analisis kebijakan publik. Hal ini penting agar nilai-nilai profetik Daudiyah dapat ditransformasikan menjadi instrumen evaluasi kinerja kepemimpinan yang terukur (*applied prophetic leadership*).

2. Perluasan Komparasi Tokoh: Diperlukan riset lanjutan yang membandingkan secara komprehensif karakteristik kepemimpinan Nabi Daud AS dengan model kepemimpinan profetik lainnya dalam Al-Qur'an, seperti Nabi Musa AS dalam dimensi manajerial krisis, Nabi Yusuf AS dalam manajemen logistik-ekonomi, atau Nabi Muhammad SAW, sehingga melahirkan sintesis cetak biru (*blueprint*) kepemimpinan Islam yang komprehensif.
3. Penguatan Kajian Konstitusional: Disarankan adanya kajian khusus yang membedah konsep "Ruang Mihrab" dan nomokrasi Islam dalam kisah Nabi Daud AS untuk kemudian dikontekstualisasikan ke dalam reformasi kelembagaan hukum positif di Indonesia, khususnya pada sistem pengawasan hakim dan pencegahan korupsi yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. H. (2016). *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (K. Nahdliyyin, Terj.). Yogyakarta: LKiS.
- Adabi, M. A., & Awwaliyah, N. M. (2020). *Kontekstualisasi Al-Qur'an Dan Pancasila Melalui Penguatan Muslim HUB*. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an*, 14(1), 34.
- Ahmad, N. M. (2021). *Keadilan sosial studi kisah Nabi Daud dalam Tafsir Ibnu Kathir*. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 89.
- Ahmad, N. M. (2022). *Keadilan Sosial Studi Kisah Nabi Daud Dalam Tafsir Ibnu Kathir*. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9(1).
- Al-Attas, M. N. (1993). *Islam and secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Dzahabi, M. H. (2011). *Al-Israiliyyat fi Al-Tafsir wa Al-Hadits*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Faramāwī, A. al-H. (1977). *Al-Bidāyah Fī Al-Tafsīr Al-Maudhū'ī: Dirāsah Manhajīyyah Maudū'īyyah*. Kairo: Maktabah al-Jumhūriyyah.
- Al-Farmawi, A. H. (2016). *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar* (S. A. Jamrah, Terj.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Ghazali. (2015). *Ihya ulumuddin (Jilid IV)*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Mawardi. (2014). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam* (F. Bahri, Terj.). Jakarta: Darul Falah.
- Al-Mawardi, A. I. (2006). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (F. Bahri, Terj.). Jakarta: Darul Falah.
- Al-Razi, F. (2010). *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib (Jilid 26)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Sya'rawi, M. M. (2012). *Tafsir Al-Sya'rawi (Jilid 19)*. Kairo: Dar Akhbar al-Yaum.

- Alifiani, P. (2022). *Besi Dalam Risalah Kenabian: Studi Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer*. Pekalongan: UIN Gus Dur.
- Arhamzah, T. U. A. (2025). *Pola Sisipan Isrâ'iliyyât Dalam Tafsir: Analisis Komparatif Tafsir Al-Bagawî Dan Ibnu 'Athiyah*. UIN PTIQ Jakarta, Jakarta.
- Asbib, R. T., & Azizah, A. (2023). *Penerapan Kaidah Thibaq Dan Pengaruhnya Dalam Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Anbiya*. Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 5(2), 164–179.
- Ash-Shallabi, A. M. (2019). *Sejarah Lengkap Nabi-Nabi Allah* (Artawijaya, Terj.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zamakhshari. (2001). *Al-Kasysyâf 'an haqâ'iq ghawāmid al-tanzîl* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Tafsîr al-munîr fî al-'aqîdah wa al-syarî'ah wa al-manhaj* (Jilid 17). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. New York: Free Press.
- Batubara, A. A. H., Ginting, C. S., Amalia, M., Nasution, M. R., & Syahbudin. (2025). *Etika Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam: Teladan Nabi Sebagai Fondasi Integritas Pemimpin Modern*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat, 5(2).
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969). *Management of organizational behavior: Utilizing human resources*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Hidayat, K. (2015). *Agama punya agama: Memosisikan agama dalam kehidupan publik*. Jakarta: Noura Books.
- Ibn Taimiyah, T. A. (1998). *As-Siyasah asy-Syar'iyah fî ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibnu Katsir. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir* (M. A. Ghoftar, Terj.). Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ibnu Katsir. (2018). *Kisah para nabi: Tahqiq Syaikh Al-Albani* (D. Dhani, Terj.). Jakarta: Ummul Qura.

- Ibnu Katsir, A. A. F. I. (2014). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Jilid 5 & 6). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kahle, L. (1983). *Social values and social change: Adaptation to life in America*. New York: Praeger.
- Kamil, S. (2013). *Teori Politik Islam: Konflik Dan Integrasi Agama Dan Negara*. Jakarta: Kencana.
- Kholil, N. I. (2022). *Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Kisah*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, Jakarta.
- Komisi Yudisial. (2023). *Penegakan dan penguatan integritas peradilan*. Jakarta: KY RI.
- Lailiya, R., & Fitriatin, N. (2025). *Etika kepemimpinan dalam administrasi pendidikan Islam: Kepemimpinan berintegritas*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1).
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rationalitas, Dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif, A. S. (2017). *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Madjid, N. (2013). *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Mas'ood, M. (2014). *Negara, Kapital, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nashir, H. (2013). *Pendidikan Karakter Berbasis Agama Dan Budaya*. Yogyakarta: Multi Presindo.
- Pelmelay, E., & Pelmelay, A. *Model Kepemimpinan Daud Dan Implikasinya Bagi Kepemimpinan Masa Kini*. *Jurnal Kala Nea*, 2(2).
- Quthb, S. (2011). *Fi zhilalil Qur'an: Di bawah naungan Al-Qur'an* (Juz II). Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahardja, M. N. A. (2023). *Kepemimpinan Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS dalam Al-Qur'an*. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Rokeach, M. (1973). *The nature of human values*. New York: Free Press.

- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 8 & 11). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). *Metode penyusunan tafsir maudhu'i*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2014). *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah, dan Pemberitaan Gaib*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukron, K. (2013). *Teori politik Islam: Konflik dan integrasi agama dan negara*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin, D. (2012). *Etika politik Islam: Konsep dan implementasi*. Jakarta: Repositori Bangsa.
- Tubagus, S. *Makna kepemimpinan Nabi Daud dalam Perjanjian Lama*. Journal of Christian Education and Leadership, 1(1).
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Boston: Pearson.
- Zubairin, A. (2025). *Metode tafsir maqasidisistemik (Sebuah pendekatan tafsir maqasidi berbasis sistem dalam memahami teks dan konteks Al-Qur'an)* (Disertasi tidak diterbitkan). UIN PTIQ Jakarta, Jakarta.